

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT* DALAM PENGEMBANGAN TATA
KELOLA *SMART VILLAGE* (STUDI KASUS DI DESA RANTE MARIO
KECAMATAN TOMMO KABUPATEN MAMUJU)**



Disusun dan diusulkan oleh

Nur Mutma Inna

105641108620

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

**IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PENGEMBANGAN TATA
KELOLA SMART VILLAGE (STUDI KASUS DI DESA RANTE MARIO
KECAMATAN TOMMO KABUPATEN MAMUJU)**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Politik (S.IP)**

Disusun dan Diajukan Oleh

Nur Mutma Inna

Nomor Stambuk : 105641108620

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : *Implementasi E-Government* Dalam Pengembangan
Tata Kelola *Smart Village* (Studi Kasus Di Desa
Rante Mario Kecamatan Tommo
Kabupaten Mamuju)

Nama Mahasiswa : Nur Mutma Inna

Nomor Induk Mahasiswa : 105641108620


Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Mengetahui

Pembimbing 1


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

Pembimbing 2


Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

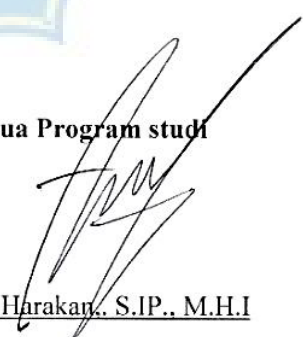
Menyetujui

Dekan Fisip Unismuh Makassar


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM.730 727

Ketua Program studi


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

NBM.1207 163

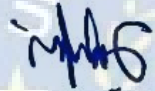
HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji Ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0257/FSP/A.4-II/V/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Makassar pada hari Rabu, 08 Mei 2024.

TIM PENILAI

KETUA

SEKERTARIS



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM. 730 727

NBM. 992797

TIM PENGUJI


1. Dr. Nuryanti Mustari, S. IP.,M.Si



2. Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP.,M.Si



3. Nurbiah Tahir, S. Sos., M.AP



4. Hardianto Hawing, ST., MA



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Mutma Inna

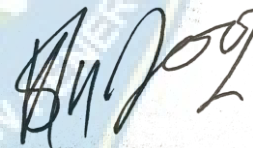
Nomor Induk Mahasiswa : 105641108620

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 Februari 2024

Yang Menyatakan,



Nur Mutma Inna

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “*Implementasi E-government dalam Pengembangan Tata Kelola Smart Village di Desa Rante Mario Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju*”, Sebagai salah satu syarat mendapat Gelar Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Salam dan salawat semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah SWT kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan kepada kita semua. Penulis berharap apa yang dipaparkan dalam skripsi ini dapat memberikan informasi baru bagi kita semua. Orang tua saya tercinta ayahanda Hardi dan ibunda Normawati yang selalu memberikan kasih sayang, doa serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga dan terimakasih sudah menjadi orang tua yang sangat luar biasa baik, terimakasih sudah menemani penulis berjuang sejauh ini. Penulis menyadari ucapan terimakasih ini sangat tidak sebanding dengan pengorbanan kedua orang tua penulis dalam membimbing dan menemani penulis berjuang sejauh ini. penulis juga sangat meminta maaf kepada kedua orang tua penulis apa bila selama ini penulis masih sering melakukan kesalahan. Terimakasih atas setiap iringan doa di setiap sujudnya hingga penulis sampai pada saat seperti ini. Penulis sangat berharap suatu saat nanti penulis dapat membalas segala pengorbanan yang telah di lakukan oleh orang tua penulis bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan masukan sangat Penulis hargai.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Rudi Hardi, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang tidak ternilai harganya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memimpin Universitas ini dengan baik.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina Fakultas ini dengan baik.
4. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan yang juga telah membantu peneliti dan telah membina jurusan ini dengan baik.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Staf Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga
6. Kepada Bapak I Komang Wisnu Wardana S.Sos selaku Kepala desa Rante Mario dan bapak Sekertaris Desa Rante Mario Made Sandya beserta staf-stafnya, yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Terimakasih juga kepada masyarakat Desa Rante Mario yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

8. Kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang ramah dan cekatan dalam melayani setiap keluhan penulis dalam menyelesaikan skripsi, khususnya untuk bapak, ibu yang selalu memudahkan dalam pengurusan berkas persyaratan ujian skripsi dan selalu memberikan dorongan untuk semangat
9. Kepada saudara kandung saya kakanda ihcmal yang juga telah banyak membantu saya baik dalam hal materinya, moril dan dukungannya selama ini yang selalu menjadi garda terdepan yang selalu melindungi penulis. Penulis menyadari di balik *over protektifnya* semata-mata hanya untuk kebaikan penulis. Dan terimakasih sudah sangat sabar menghadapi sikap penulis yang kadang menjengkelkan dan keras kepala.
10. Terimakasih juga kepada Alm tante saya yang telah banyak membantu penulis dalam hal materi, moril dan makasih juga telah menjadi tante yang sangat luar biasa baik dan sayang kepada penulis, dan makasih sudah bisa menjadi ibu bahkan sahabat bagi penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan penulis memohon maaf kepada tante karena penulis tidak sempat ada di samping tante saat tante dalam keadaan sakit. Dan penulis juga memohon maaf kalau penulis belum sempat bisa membalas budi kepada tante atas apa yang tante berikan kepada penulis.
11. Kepada keluarga besar saya yang juga telah banyak membantu baik dalam material, moril, dan dukungannya selama ini, terimakasih telah mendukung saya sejauh ini dan selalu memberikan semangat kepada penulis Ketika penulis sedang merasa tidak baik-baik saja.

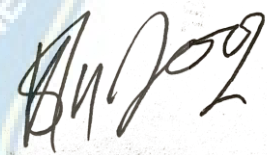
12. Dan penulis juga sangat berterimakasih kepada sahabat-sahabat penulis khususnya Azizah, Fina, Restu, Ana, Hilma, Fatur, Iwan, Iyan, Faiz, Ian, Ewink, Fahrul dan Amar Terima kasih atas dukungan moril dan materilnya serta dukungan dan motifasinya baik di kampus maupun di luar kampus, terimakasih telah menemani penulis berjuang dari semester satu hingga sekarang, terimakasih juga karena sejauh ini sudah menjadi saudara taksedarah di tanah Rantau ini, Semoga kebersamaan kita sampai tua dan membawa kenangan indah.
13. Penulis juga sangat berterimakasih kepada teman kost saya Nurul Azizah yang sejauh ini sudah menemani penulis, makasih sudah mau menjadi tempat berkeluh kesah Ketika penulis lagi tidak baik-baik saja, makasih sudah mau mendengar segala curhat penulis, dan terimakasih sudah selalu menjadi orang yang menghibur penulis Ketika penulis lagi sedih atau bahkan menangis. penulis sangat menyadari bahwa penulis sangat merepotkan azizah, penulis sangat meminta maaf kepada azizah jika selama satu kost dengan penulis saudara azizah merasa kesal dengan tingkah laku penulis. Tetap-lah menjadi saudara tak sedarah saya.
14. Terimakasih kepada keluarga besar IPC atas kebersamaanya selama ini, canda tawa yang di berikan dalam kelas yang sangat berkesan bagi penulis.
15. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
16. Terimakasih kepada ibu kost dan kakak-kakak yang ada di kost aspuri indah yang selalu mendukung penulis dan menyemangati peneulis dalam setiap hal,

dan penulis berterimakasih banyak karena sejauh ini sudah mau menganggap penulis sebagai adek sendiri di tanah rantau ini.

17. Penulis sangat mengucapkan banyak terimakasih kepada diri sendiri karena sudah mau berjuang sejauh ini walaupun sudah banyak suka duka yang di lalui, dan sudah banyak kata capek terlontar dari mulut penulis dan tangisan tapi penulis tetap bangga kepada diri sendiri karena mampu bertahan hingga sejauh ini.

Penulis berharap semoga bantuan dan berbagai Upaya yang telah di sumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang setimpal disisi Allah SWT dan tetap mendapat lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akhirnya penulis memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala khilaf baik yang di sengaja maupun tidak di sengaja.

Makassar, 22 februari 2024



NUR MUTMA INNA

ABSTRAK

Nur Mutma Inna. Tahun 2024 Nuryanti Mustari, Rudi Hardi. Implementasi *E-Government* dalam pengembangan tata Kelola *Smart Village* di Desa Rante Mario Kec. Tommo kabupaten Mamuju.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami *Implementasi E-Government* dalam Tata-tata Kelola *Smart Village* di desa Rante Mario, Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif sumber data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-government* dalam tata kelola *smart village* di desa Rante Mario, Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, menggambarkan Desa Rante Mario menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam penerapan program *smart village*. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengembangan tata kelola *smart village* yaitu karena sumber daya manusia yang belum mempunyai seperti desa-desa yang sudah lebih dulu mempunyai *smart village*, tantangan berikutnya itu *website*-nya yang belum bisa digunakan dan *wifi*-nya masih dalam proses perbaikan. Dan adapun peluang yang di hadapi dalam hal pengembangan *smart village* ini yaitu dapat meningkatkan kualitas masyarakat pada ekonomi lokal, dapat meningkatkan infrastruktur digital, meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih baik lagi kedepanya, dan agar lebih memahami teknologi supaya tidak ketinggalan *inovasi-inovasi* baru dan edukasi untuk kemajuan desa itu sendiri dan masyarakat. dengan menggunakan teori menurut David Corten, hasil menunjukkan bahwa komponen *implementasi* yaitu kesesuaian antara program dengan pemanfaat atau pengguna, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, kesesuaian antara kelompok dan pemanfaat, komponen tersebut dalam implementasi *e-government* dalam tata kelola *smart village* di desa Rante Mario, kecamatan tommo kabupaten mamuju telah sesuai, namun harus tetap di evaluasi untuk menyesuaikan teknologi yang ada dengan cara melakukan edukasi dan program pelatihan serta lebih mengembangkan platform partisipatif yang memungkinkan warga desa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci: Implementasi, *E-Government*, *Smart village*, Pengembangan, Tata kelola

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I_PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II_TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Teori Dan Konsep	12
C. Kerangka Pikir	30
D. Fokus Penelitian.....	31
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	31
BAB III_METODE PENELITIAN	33
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis Penelitian dan tipe penelitian	33
C. Sumber Data.....	34
D. Informan.....	34
E. Teknik Pengumpulan data	35
F. Teknik analisis data	36
G. Teknik Pengabsahan Data.....	37

BAB IV_HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	39
B. Implementasi <i>E-Government</i> dalam Pengembangan Tata Kelola <i>Smart Village</i>	45
C. Pembahasan.....	58
BAB V_PENUTUP.....	64
A. KESIMPULAN.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Gambar 2.2 Overlay visualization.....	11
Gambar 2.2 Kerangka Pikir	30



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klaster Implementasi E-Government Dalama Pengemban Tata Kelola Smart Village.....	12
Tabel 3.1 Tabel Informan	35



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia sudah nyaris tidak bisa lepas dari teknologi, hampir di semua sektor dan aspek kehidupan manusia menggunakannya, baik dalam hal pengetahuan, ekonomi, budayaakan dimanjakan dengan teknologi, dari yang biasanya mengerjakan sesuatu menggunakan alat tradisional sekarang sudah menggunakannya dengan berbagai macam teknologi seperti teknologi komputer dan sebagainya. Di abad yang ke-21 ini perkembangan teknologi dalam lingkup Pendidikan, ekonomi serta pemerintahan sangat berpengaruh dalam menghadirkan kemudahan serta efektivitas dalam penggunaannya tak perlu di ragukan lagi, kemajuan teknologi membuat kita semakin mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang dipergunakan (Wahyudi et al., 2022)

Pemerintah dalam upaya pemberian pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat tersebut dikenal dengan istilah *e-government*. Tidak ada batas wilayah yang memisahkan satu daerah dari yang lain. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, berbagai sektor kehidupan manusia sedang mengalami transformasi. Hal ini juga berlaku pada sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui aplikasi dan web browser. Pelayanan pemerintah yang sebelumnya birokratis dan sangat manual

dihilangkan melalui pemanfaatan aplikasi, sehingga menjadi lebih fleksibel dan berorientasi pada kepuasan pengguna.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penerapan teknologi ini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan, tetapi juga merambah hingga ke wilayah pedesaan. *E-government* adalah teknologi informasi tunggal yang digunakan pemerintah Indonesia untuk melakukan layanan publik dengan proporsi yang sangat besar. Sebagai metode untuk menanggapi dan mengembangkan perubahan global dalam teknologi informasi, pemerintah Indonesia didorong untuk dengan cepat mengembangkan sistem digital yang akan membantu dan menyederhanakan operasi pemerintah hingga generasi berikutnya (Tasyah et al., 2021).

Salah satu bentuk penerapan teknologi yang kian mendapatkan perhatian adalah konsep *e-government* atau pemerintahan elektronik. Penerapan *e-government* membawa potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi Masyarakat, dan kualitas layanan publik. Teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita berinteraksi, bekerja, dan partisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek penting dari perkembangan ini adalah penerapan konsep *e-government* atau pemerintahan elektronik.

E-government merupakan konsep yang mengacu pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek pemerintahan dan administrasi publik. Ini mencakup penggunaan platform daring, aplikasi berbasis teknologi,

dan sistem otomatis untuk memberikan layanan publik, mengelola informasi, serta memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan Masyarakat. Konsep ini bukan hanya sekedar transformasi digital administrasi, tetapi juga melibatkan transformasi dalam cara kita berinteraksi dengan pemerintahan dan mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.

Seiring berjalannya waktu, banyak daerah mulai mengimplementasikan pemerintahan elektronik untuk layanan masyarakat, yang disertai dengan sejumlah besar lembaga pemerintah yang mulai menggunakan teknologi informasi untuk keuntungan mereka sebagai media untuk memfasilitasi penyebaran informasi publik dan penyelenggaraan bisnis publik. Sebagai hasil dari pertumbuhan strategisnya, *e-government* tidak diragukan lagi merupakan upaya langsung. Namun, lebih penting dari sebelumnya bahwa kebutuhan untuk Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi diakui untuk memberikan layanan berkualitas tinggi kepada masyarakat. Selain itu, alat lain yang dapat digunakan mencakup yang mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, koherensi, dan berbagai alat lainnya (Sosiawan dalam Yulhendri, 2020:12).

Desa merupakan garda terdepan pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan dan pembangunan nasional. Penguatan pedesaan adalah hal yang harus diprioritaskan dalam kasus ini. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengubah daerah sekitar pedesaan menjadi pusat pengembangan manusia, ekonomi, sosial, dan infrastruktur (Maulita, 2022).

Pengembangan tata Kelola *smart village* merupakan tujuan penting dalam mewujudkan desa yang modern dan berkelanjutan. Di desa Rante Mario, penerapan *e-government* memiliki potensi besar untuk membentuk desa yang lebih maju secara teknologi dan memiliki kualitas layanan yang lebih baik bagi Masyarakatnya. Melalui platform *e-government*, Masyarakat dapat mengakses informasi tentang program-program Pembangunan, kebijakan-kebijakan terbaru, serta memiliki mekanisme untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Penerapan *smart village* di Indonesia konteks ini didukung oleh 3 (tiga) elemen utama, yakni kapasitas pemerintah, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi (Prakoso dalam Yulhendri, 2020:12). Selain mengintegrasikan setiap elemen ke dalam satu sistem teknologi informasi yang mudah diakses, tujuan pengembangan desa cerdas adalah untuk menyediakan transportasi umum universal yang efisien, dapat diakses dan adil untuk seluruh populasi. (Sudarto dalam Yulhendri, 2020:12).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, konsep *Smart Village* telah menjadi gagasan viral yang harus dipertimbangkan. Ini adalah hasil dari beberapa perubahan yang telah terjadi, yang pertama adalah akselerasi revolusi industri 4.0, yang memberitahu masyarakat Indonesia bahwa mereka harus mampu melakukan bisnis *online*. Sebagai hasil dari *COVID-19* pandemi, yang mencegah populasi dari menerima layanan dari pemerintah dengan tepat waktu, ekonomi Indonesia juga menderita. Oleh karena itu pemerintah desa telah ditugaskan untuk memaksimalkan kapasitas digitalisasi dan menggunakannya untuk menyediakan

layanan digital kepada masyarakat umum (Prayogi et al., 2020).Sebaliknya, digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital untuk informasi dan komunikasi melalui perangkat digital seperti smartpone, komputer, dan perangkat lainnya seperti pendukung (Lindgren et al., 2019).Akibatnya, proses manual sebelumnya sekarang otomatis.

Selain itu *e-government* juga membuka peluang untuk penyediaan layanan publik yang lebih baik.Informasi mengenai layanan Kesehatan, Pendidikan, dan infrastruktur dapat diakses secara lebih muda oleh Masyarakat.Hal ini memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup maasyarakat di desa Rante Mario.Dan Pengembangan *e-government* juga dapat menjadi alternatif strategis untuk berbagi informasi di dua arah antara pemerintah dan masyarakat (Rafinzar & Kismartini, 2020).

Transparansi dalam pemerintahan juga merupakan elemen penting dalam Pembangunan berkelanjutan.Dengan adanya platfrom *e-government*, informasi tentang anggaran publik, kebijakan pemerintah, dan proyek-proyek Pembangunan dapat di akses oleh Masyarakat dengan mudah.Ini membuka peluang bagi Masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana publik dan memberikan masukan yang konstruktif.Selain itu, *e-government* juga mendorong partisipasi aktif Masyarakat dapat memberikan pendapat mereka tentang kebijakan dan program-program yang sedang dikerjakan.Partisipasi ini memberikan legitimasi pada kebijakan yang diambil dan membantu memastikan bahwa kepentingan Masyarakat di wakili dengan baik.Dengan perkembangan *e-government*, sekarang

ada kemungkinan untuk menggunakannya untuk memajukan pemerintahan yang baik atau pelayanan pemerintah (Rafinzar & Kismartini, 2020).

Kemudian dalam perkembangannya, Banyak daerah telah menerapkan e-government dalam pelayanan publik, ditandai dengan semakin banyaknya lembaga pemerintah yang mulai memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini sebagai media untuk memudahkan penyampaian informasi publik dan pelayanan publik. Penerapan e-government ini bukan hanya karena perkembangan lingkungan strategis, tetapi lebih karena adanya kebutuhan untuk mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi demi mencapai kualitas layanan yang prima kepada masyarakat. Selain itu, e-government juga bertujuan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, koherensi, dan efektivitas yang dimungkinkan oleh teknologi tersebut (Sosiawan dalam Yulhendri, 2020:12).

Sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai konsep desa cerdas. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa setiap desa memiliki karakteristik unik yang tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Selain itu, dinamika sosial terus berlangsung. Meskipun belum ada kesepakatan tentang definisi desa cerdas atau smart village, secara umum desa dapat dianggap sebagai desa cerdas jika menggunakan teknologi informasi secara kreatif untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan desa cerdas yang fundamental akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa, yang pada akhirnya mendorong pembangunan berkelanjutan. Keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan sosial adalah tiga tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan tersebut. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 hingga 2030 dengan tema "Mengubah dunia kita, agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan" mencakup tiga tujuan utama pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan desa cerdas dapat berkontribusi besar terhadap pembangunan berkelanjutan karena erat kaitannya dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut (Amari, 2023).

Kepribadian setiap individu menerima pengembalian kepercayaan dan kesuksesan secara utuh. Implementasi transformasi digital sebagai proyek prioritas strategis dalam RPJM 2020-2024 mempercepat program prioritas nasional seperti Desa Digital (Dedi) dan Desa Wisata (Dewi), menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT-RI). Pembangunan desa cerdas atau smart village adalah bagian dari isu Desa Digital. Oleh karena itu, dasar dari prakarsa desa cerdas adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Masyarakat cerdas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Desa, adalah masyarakat yang memenuhi persyaratan tertentu. Inisiatif untuk menciptakan desa cerdas memiliki banyak karakteristik yang relevan, termasuk pemerintahan yang cerdas (Smart Governance), masyarakat yang cerdas (Smart Community), serta lingkungan yang cerdas (Smart Environment). Namun, hal ini tidak dapat diterapkan sebagai satu-satunya tujuan pengembangan (Amari, 2023).

B. Rumusan Masalah

Dalam konteks desa Rante Mario, kecamatan Tommo, kabupaten Mamuju, penerapan *e-government* sebagai bagian dari pengembangan tata Kelola *smart village* menjadi perhatian yang penting. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

Bagaimana implementasi *e-government* dalam tata kelola *smart village* di desa Rante Mario Kecamatan Tommo

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami implementasi *e-government* dalam tata kelola *smart village* di desa Rante Mario Kecamatan Tommo

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

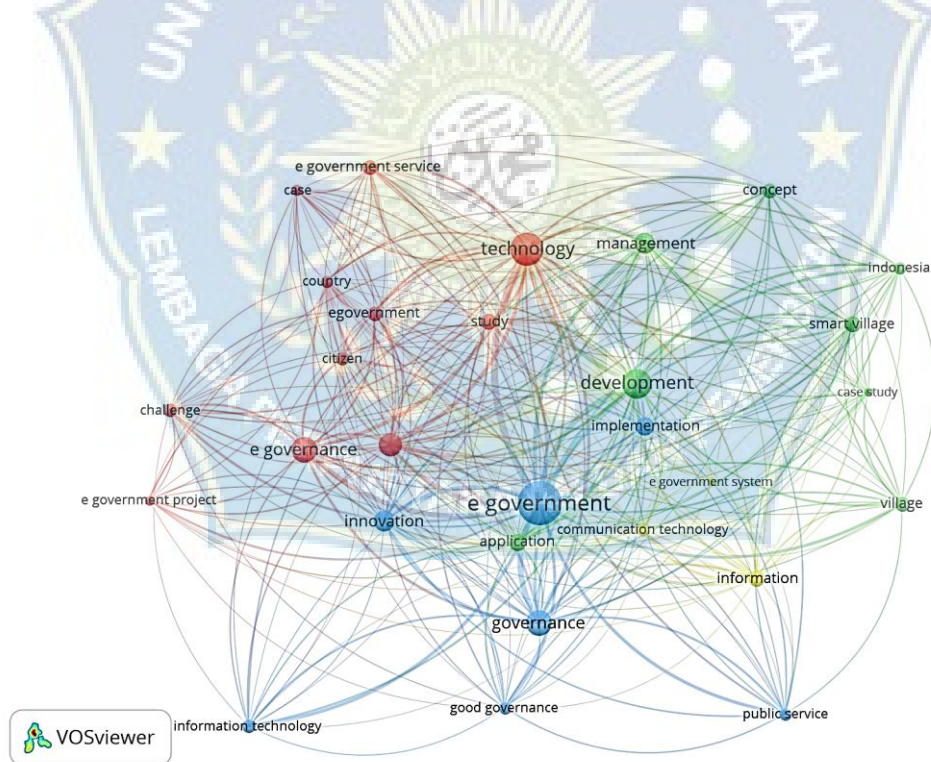
1. Bagi pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju: Hasil penelitian dapat menjadi acuan dalam merancang kebijakan dan program untuk mendorong pengembangan *smart village* melalui penerapan *e-government*
2. Bagi Masyarakat Desa Rante Mario: penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang potensi dan manfaat penerapan *e-government* dalam kehidupan sehari-hari, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan *smart village*
3. Bagi peneliti lain: penelitian ini dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi peneliti lain yang tertarik untuk menggali lebih dalam tentang penerapan *e-government* dalam konteks pengembangan desa pintar (*smart village*)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk mendukung menjadi tolak ukur untuk menjadi sebuah penelitian baru. Penelitian berjudul *Implementasi e government* dalam pengembangan tata Kelola *smart village* di desa Rante Mario kecamatan tommo kabupaten Mamuju yang menggunakan data olah data vosviwer untuk mengetahui penelitian terdahulu sebagai yang digunakan untuk melengkapi serta membandingkan informasi dan data yang di temukan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Penelitian Terdahulu

Sumber: Diolah Oleh VOSviewer,2023

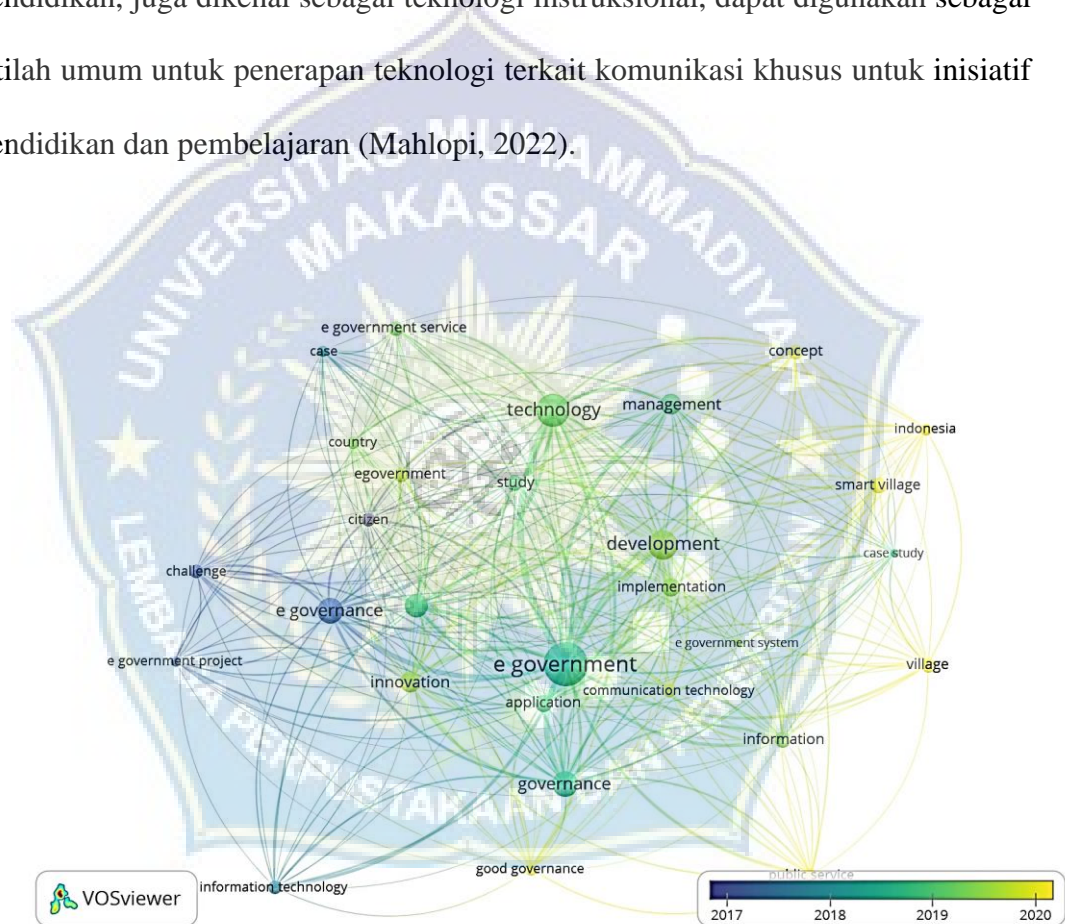
Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dengan menggunakan publish or perish di temukan 00 artikel jurnal dengan rentan waktu 2013-2023 yang dimana artikel-artikel tersebut berkaitan erat dengan kata kunci *implementasi e-gvornment* dalam pengembangan tata kelola *smart village*. Artikel ini kemudian di Kelola menggunakan *vosviewer* untuk menentukan posisi proyek penelitian dan peneliti.

Hasil olah data *vosviewer* ada 40 items dan beberapa penelitian yang menjadi objek dalam penelitian terdahulu, diantaranya ada beberapa penelitian tentang *e-government* mengenai temuan penelitian ini, setiap pegawai sipilyang bekerja pada subbagian keuangan provinsi DIY berjumlah sekitar 128 orang. Populasi dalam survei ini ditetapkan sebagai responden karena merupakan survei terhadap masyarakat umum atau survei indra. terdapat 111 tanggapan responden yang setuju dengan pernyataan tersebut. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap responden secara bergantian.(Najahningrum, 2013)

Selain itu juga ada juga penelitian yang membahas *village* seperti penelitian Desa memiliki keunggulan dibandingkan kelurahan tetangga atau daerah lain karena desa mempunyai pemerintahan yang dipilih dan sah.Hal ini berdasarkan UU No 6 Tahun 014 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa adalah desa, desa adat, atau nama lain desa.Selanjutnya dinyatakan bahwa desa adalah suatu hukum kesatuan masyarakat yang memenuhi batas wilayah dan bersedia mendukung urusan pemerintahan, serta merupakan syarat bagi masyarakat (Ariadi, 2019).

Teknologi merupakan salah satu alat yang mempermudah proses pembelajaran.Menurut Nasution (1984), teknologi adalah pengembangan,

penerapan penilaian sistem-sistem, teknik, dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja manusia peserta didik. Teknologi untuk pembelajaran adalah metode pengajaran yang menggunakan alat-alat kontemporer seperti radio, komputer, dan perangkat lain yang seringkali tidak dirancang untuk digunakan di ruang kelas untuk tujuan akademis. Danim (2010) menjelaskan bahwa teknologi pendidikan, juga dikenal sebagai teknologi instruksional, dapat digunakan sebagai istilah umum untuk penerapan teknologi terkait komunikasi khusus untuk inisiatif pendidikan dan pembelajaran (Mahlopi, 2022).



Gambar 2.2 *Overlay visualization*

Sumber Data: Diolah Oleh VOSviewer, 2023

Selanjutnya dalam melakukan analisis tata Kelola logistic peneliti menggunakan aplikasi *vosviwer* yang akan menampilkan pemetaan yakni dalam

bentuk tiga *visualisasi e governance, development, e government, communication teknologi* dari gambar di atas dapat di jelaskan sebagai berikut

Tabel 2.1 Klaster Implementasi *E-Government* Dalam Pengembangan Tata Kelola *Smart Village*

Klaster 1 (11 item)	(Merah) tantangan, warga negara, negara, e pemerintahan, e proyek pemerintahan, layanan pemerintah, pemerintah elektronik, pemerintah, belajar, teknologi.
Klaster (8 item)	(hijau) aplikasi, studi kasus, konsep, perkembangan, Indonesia, pengelolaan, desa pintar, desa.
Klaster 3 (7 item)	(Biru) e teknologi, informasi tata Kelola, pemerintahan, penerapan, pemerintahan yang baik, pemerintahan, penerapan, pelayanan publik, teknologi, informasi.
Klaster 4 (3 item)	(Kuning) teknologi komunikasi, dan informasi sistem, pemerintahan

Sumber Data: Diolah Oleh VOSviewer Tahun 2023

B. Teori Dan Konsep

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi adalah proses menemukan bentuk untuk apa yang disepakati pada awalnya dan seterusnya. Proses untuk memastikan kebijakan ini diterapkan dan dicapai dikenal sebagai implementasi. Tujuan dari implementasi sistem adalah untuk menyelesaikan desain sistem yang disetujui, menguji dan merekam program dan proses yang diperlukan, memastikan bahwa staf mampu mengoperasikan sistem baru, dan memastikan transisi yang lancar dan bebas kesalahan dari sistem lama ke yang baru (Rifqo & Wijaya, 2017)

Usman menyatakan perspektifnya tentang implementasi sebagai berikut: "Mekanisme suatu sistem atau aktivitasnya berfungsi sebagai dasar untuk implementasi. Menempatkan suatu kegiatan ke dalam praktek melibatkan merencanakannya dan memastikan ia melayani tujuan yang dimaksudkan. Akibatnya, implementasi dipengaruhi oleh objek berikutnya dan tidak ada secara terisolasi (Rosad, 2019).

Menurut Patton & Sawicki proses implementasi adalah serangkaian permainan di mana banyak aktor menggunakan gerakan tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Teknik permainan biasanya digunakan dalam upaya untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya kebijakan, seperti sistem pemantauan, negosiasi ulang tujuan pasca-program, atau penambahan berbagai komponen baru ke program yang sudah ada.

Lebih baik jika hasil akhir program dapat diukur atau dibandingkan dengan tujuan kebijakan untuk mengevaluasi proses implementasi kebijakan secara keseluruhan. (Suprpto & Malik, 2019). Implementasi merupakan perpanjangan dari kegiatan saling beradaptasi disebut implementasi dan itu adalah siklus rekayasa. Manajemen yang efektif diperlukan untuk implementasi atau implementasi untuk berhasil. (No Title, 2018)

Implementasi dalam Kamus Bahasa Indonesia dipahami sebagai implementasi atau aplikasi. Menurut Fullan, implementasi adalah proses berlatih atau menerapkan ide, program, atau kelompok kegiatan baru bagi orang-orang yang mencoba atau diharapkan untuk berubah (Islamic &

Manajemen, 2018). Implementasi dapat didefinisikan sebagai proses bekerja dan melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh entitas swasta atau pemerintah karena melibatkan berbagai sumber daya, seperti sumber daya manusia, dana, dan kemampuan organisasi, dan dapat dilakukan oleh pemerintah atau sektor swasta (Virgoreta et al., n.d.).

Implementasi didasarkan pada kegiatan, tindakan, atau mekanisme sistem, adalah tindakan atau eksekusi rencana yang dipikirkan dengan hati-hati dan terperinci. Ini bukan hanya kegiatan, tetapi kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan rencana. Ini biasanya terjadi setelah perencanaan telah dianggap ideal (Hukum, 2017).

Sutabri menyatakan bahwa implementasi adalah Proses memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya konseptual dan material untuk menciptakan sistem yang beroperasi secara konstan dan bersamaan dikenal sebagai implementasi. Sedangkan implementasi menurut Ahmad yaitu implementasi sebagai proses untuk memastikan bahwa kebijakan dilakukan dan tujuannya terpenuhi. Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi yaitu penerapan teori atau rencana yang dikembangkan oleh individu atau kelompok untuk tujuan. (Hidayat et al., 2014). Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan (Rupa et al., 2021)

2. E-Government

Pemerintahan berbasis komputerisasi atau yang dikenal dengan sebutan pemerintahan elektronik diawali dengan diterbitkannya Pedoman Resmi Nomor

3 Periode 2003 tentang Pendekatan Publik dan Teknik Kemajuan Electronic Government. Melalui penerapan e- Government, otoritas publik menggunakan inovasi data untuk mengatur kerangka kerja dewan dan meningkatkan proses kerja di dalam otoritas publik. Memperhatikan Petunjuk Resmi Nomor 3 Periode 2003, juga dapat dipahami bahwa pemanfaatan inovasi data dalam penyelenggaraan e-Government mencakup dua kegiatan yang saling berdampak. Pertama, latihan yang mencakup data dewan, penanganan informasi, siklus kerja, dan sistem eksekutif yang dijalankan secara elektronik. Aksi selanjutnya merupakan tindakan terkait penataan administrasi publik yang memanfaatkan kemajuan inovasi data. Sehingga warga di seluruh daerah dapat mengakses pelayanan publik dengan lebih cepat, efisien dan efektif (Yuni dan Adnan, 2022)

Pemerintah dapat dicirikan sebagai pemanfaatan inovasi data, (misalnya, organisasi wilayah luas, *web*, dan pertukaran serbaguna) oleh lembaga pemerintah yang dapat mengubah hubungan antara otoritas publik dan warganya, pelaku bisnis, dan yayasan pemerintah lainnya. Inovasi ini dapat memiliki tujuan yang berbeda-beda, mulai dari: memberikan organisasi berbasis pembayar pajak yang lebih baik kepada warga, memperluas kerjasama dengan dunia usaha dan modern, memberdayakan daerah melalui akses terhadap data, atau dewan pemerintahan yang lebih kompeten. Hasil rata-rata dapat berupa berkurangnya kehinaan, peningkatan keterusterangan, peningkatan kenyamanan, peningkatan gaji, dan juga penurunan biaya (Utama Andri Arjita, 2017).

Konsep e-Government dapat diartikan sebagai pemanfaatan data dan inovasi komunikasi penyiaran untuk organisasi pemerintah yang kompeten dan menarik, serta menawarkan jenis bantuan yang mudah dan dapat diterima oleh warga umum. Dengan e- Government, kerjasama dan kosumber datasi baru dapat terjalin antara pemerintah provinsi satu dengan pemerintah provinsi lainnya, antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antara pemerintah dengan warga, dan antara pemerintah dengan dunia usaha. Dengan cara ini, penggunaan e-Government di bidang otoritas publik memainkan peran penting dalam memahami keinginan otoritas publik untuk bekerja pada sifat administrasi pengadaan kebijakan, karena dengan administrasi sederhana yang harus terlihat dan dilakukan. melalui *web*, warga umum dapat mengetahui prasyarat penting. Dalam menpengajars sesuatu, misalnya menpengajars SITU, SIUP, akta kelahiran, dan lain-lain, berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan dan berapa lama siklusnya. Sejalan dengan itu, terdapat keyakinan mengenai biaya dan waktu, yang sering kali menjadi masalah dalam administrasi biasa dan pribadi (Supriyanto, 2016).

Dengan menerapkan e-Government, Anda dapat membangun kelangsungan dan produktivitas pemerintahan terbuka melalui administrasi yang nyaman, cepat dan adil untuk membantu semua klien tanpa segregasi. Hal ini karena e-Government memanfaatkan aplikasi berbasis *web* yang dapat mengumpulkan, mengirim, memberikan informasi dan menyampaikan klien dengan cepat. Dengan memberikan administrasi publik yang kuat dan efektif, biaya fungsional pemerintah akan berkurang. Dalam menjalankan e-Government,

warga umum dapat memperoleh seluruh data mengenai kewenangan publik yang disalurkan melalui situs tersebut, seperti pengumpulan distribusi, rencana belanja dan konsumsi, dan lain-lain.

Sejalan dengan itu, e-Government membantu meningkatkan keterusterangan dalam pemerintahan sehingga dapat menghilangkan kemerosotan nilai dan warga umum dapat mengambil bagian dalam mengendalikan kegiatan-kegiatan pemerintah. Dari segi strategi, otoritas publik mengarahkan e-Government di Indonesia dalam Pedoman Resmi (Perpres) Nomor 95 Periode 2018 tentang Kerangka Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kerangka Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diketahui bahwa organisasi administrasi yang menggunakan inovasi data dan kosumber datasi untuk menawarkan jenis bantuan kepada klien SPBE (Imania dan Haryani, 2021).

Sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan upaya berkesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa dalam bersaing. Menjelang akhir periode 2025, diyakini bahwa pemerintah sudah bisa mencapai keberhasilan dalam terlaksananya penggabungan SPBE baik di dalam maupun antar Lembaga Fokal dengan Pemerintah Daerah, dan tersedianya SPBE antara Lembaga Fokal dan DPRD Provinsi. Dengan adanya SPBE yang berbadan hukum diyakini akan terkoordinasinya proses bisnis pemerintahan antara Focal Office dan Badan Legislatif Teritorial sehingga akan membentuk satuan pemerintahan yang total

dan menyeluruh serta menghasilkan organisasi pemerintahan dan administrasi publik yang pengadaannya unggul (Awaludin, 2019).

E-Government merupakan sebuah strategi yang berfungsi secara mengagumkan dalam kosumber datasi antara otoritas publik dan individu, negara, atau bahkan otoritas publik itu sendiri. Administrasi dibuat dengan pertimbangan luar biasa yang melibatkan inovasi data dan kosumber datasi untuk memberikan insentif bagi klien. Ada beberapa penanda yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sifat pembicaraan publik dalam kaitannya dengan inovasi terkomputerisasi (Ari et al., 2021).

- a. efisien karena sifat data atau administrasi yang dapat diakses dan digunakan tanpa kendala.
- b. keandalan karena cepat dan mudah untuk mengakses, menggunakan dan mendapatkan administrasi
- c. kepercayaan sebagai indikasi apakah keaslian suatu situs bergantung pada penilaian terbuka atau rahasia dan apakah kepercayaan tugas suatu organisasi dapat dijaga dari gangguan luar.
- d. Dukungan warga tergantung pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat, berhubungan dengan daerah setempat dan para ahlinya.

Meskipun demikian, penilaian menyatakan bahwa e-Government diketahui bahwa pemanfaatan inovasi data oleh otoritas publik yang dapat memberdayakan otoritas publik untuk mengubah hubungan dengan warga umum, wilayah rahasia, dan asosiasi lain yang memiliki kebutuhan

unik. Pemanfaatan inovasi data ini dapat mencakup pemanfaatan *web*, telepon seluler, PC, atau teknologi lainnya. Kerangka kerja ini direncanakan sebagai tahap sosialisasi terkomputerisasi yang didukung administrasi (Tasyah et al., 2021)

Kemajuan yang tiada henti dalam inovasi data dan kosumber datasi semakin menggagalkan upaya untuk terus melakukan perubahan. e-Government diyakini oleh negara-negara sebagai langkah utama yang harus diambil untuk memahami kemajuan yang terjadi dalam cara penyampaian administrasi publik kepada warga pada umumnya. Suatu jenis administrasi yang pemanfaatannya mengeksplorasi pemenuhan klien atau daerah setempat dan pemerintah sendiri yang merasakannya. Pelayanan yang diberikan oleh kerangka e-Government dapat membuat aktivitas dan sistem organisasi yang digerakkan oleh wajib pajak menjadi lebih mudah dan efektif bagi warga dan organisasi secara keseluruhan. Hal ini juga dapat memberikan banyak manfaat bagi warga secara keseluruhan, misalnya, pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk menpengajars administrasi dan kemudahan warga dalam memperoleh data pemerintah (Mustafa dkk., 2021).

Menurut Kusnadi et al (2017), terdapat dua latihan yang tersebar menjadi kegiatan yang menggunakan teknologi informasi. mereka adalah sebagai berikut:

1. Membangun kosumber datasi terprogram antara manajerial dan proses kerja dengan memanfaatkan informasi dan data.

2. Memanfaatkan kemajuan dalam inovasi data untuk menawarkan jenis bantuan kepada warga secara keseluruhan yang tidak sulit didapat dan dengan biaya yang masuk akal.

E-Government dicirikan sebagai pemanfaatan inovasi data, khususnya web, yang ditujukan untuk menawarkan jenis bantuan publik dengan cara yang lebih aman, berbasis klien, *konservatif*, lebih baik daripada organisasi pemerintah lainnya, dan dalam pelaksanaannya mempengaruhi hubungan antara warga, dunia usaha dan yayasan umum. Penerapan *E-Government* dianggap memberikan manfaat karena produktivitas dan kelangsungan kemampuan pemerintah sepenuhnya bertujuan untuk lebih mengembangkan keterusterangan pemerintah dan memperluas dukungan warga dalam proses pemerintahan (Turban, 2017).

Saat ini Indonesia sedang melakukan perubahan administrasi yang sempurna, lugas, dan diharapkan dapat benar-benar menjawab permintaan dan perubahan. Salah satu langkah penting dapat dicapai melalui perubahan otoritatif menuju e- Government, dimana sebagaimana tertuang dalam Pedoman Resmi No.3/2003, kemajuan e-Government dilakukan dengan:

- a) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan inovasi data untuk menghilangkan hambatan otoritatif dan regulasi
- b) Membangun kerangka organisasi penpengajars dan proses kerja yang memberdayakan organisasi pemerintah untuk bekerja secara

terkoordinasi, untuk meningkatkan akses terhadap semua data dan administrasi publik yang seharusnya dapat diakses.

Berdasarkan (Kusuma, 2021), terdapat permasalahan yang dapat mengganggu pelaksanaan *E-Government*, khususnya kapasitas programmer dalam melakukan pelanggaran digital. Jika setiap orang mengakses data seseorang melalui web, tingkat keamanan e-gov tidak terlindungi. *E-Government* sendiri terdiri dari pengumpulan dan penyampaian banyak data tentang penduduk, termasuk nama, alamat, nomor telepon, jadwal kerja, dan catatan properti. Para programmer yang disebutkan di atas cocok untuk melibatkan informasi dan data orang lain untuk kepentingan mereka sendiri atau untuk melayani orang lain yang mendukungnya (Tasyah et al 2021).Indrajit mencirikan *E-Government* sebagai sistem lain yang berkaitan dengan hubungan terkini antara otoritas publik dan individu-individu lain yang terlibat erat dan berada dalam situasi tegang.

Selain itu, tingkat keamanan informasi yang tinggi akan menimbulkan keraguan terhadap sistem penyampaian bantuan publik oleh warga secara keseluruhan. Selanjutnya, untuk membuat catatan saat mendapatkan informasi individu, nama klien tertentu, kata rahasia dan informasi lainnya harus diberikan. Terlebih lagi, kerahasiaan informasi digunakan untuk melindungi terhadap penyebaran infeksi pada PC. Dengan demikian, jaminan keamanan dan kebenaran informasi harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan *E-Government* (Tasyah dkk., 2021).

Dua variabel berikut yang perlu dipertimbangkan diketahui bahwa variabel sosial dan mekanis. Partisi yang terkomputerisasi di mana banyak orang tidak memiliki akses web, menghalangi mereka untuk mengambil keuntungan dari kerangka *E-Government*. Karena banyak wilayah negara di Indonesia yang terpencil dan belum matang, meningkatkan sumber daya untuk pengaturan inovasi data dan kerangka data saat ini, sehingga mendorong munculnya kesenjangan yang terkomputerisasi merupakan hal yang sulit. Oleh karena itu, tidak semua daerah di Indonesia menggunakan alat komunikasi, baik telepon maupun listrik. Karena akses web sangat penting untuk berbagi data dan bekerja dengan kosumber data dengan cepat dan efektif, hal ini mengakibatkan terbatasnya jumlah data yang dapat diakses oleh publik di sekitar (Tasyah et al 2021). Perbaikan mekanis telah mempengaruhi sudut pandang yang berbeda dari warga secara keseluruhan hingga otoritas publik (Herdiana, 2019).

3. Tata Kelola *Smart Village*

Dari perkembangan teknologi informasi, konsep *smart village* tidak bisa dilepaskan dari perkembangan konsep *smart city*. Dari kemajuan inovasi data, gagasan bagian yang cerdas tidak dapat dipisahkan dari peningkatan gagasan bagian yang cemerlang. Hal ini bergantung pada penjelasan bahwa bagian sebagai unit pemerintahan yang paling terpinggirkan dalam struktur pemerintahan Indonesia memerlukan pengisian ulang dan penerimaan perbaikan inovasi data. Maka dengan menerapkan inovasi data akan mempercepat peningkatan kecerdasan warga perbagian yang saat ini sedang dilakukan. Jika dilihat dari

kondisi spesifiknya, perkembangan kepribadian di bagian memiliki pola kemajuan yang berbeda dari warga perbagian. Bagian merupakan suatu kesatuan substansi kawasan setempat yang mempunyai pribadi dan adat istiadat tertentu, dimana kawasan setempat berada di garda depan dan penggerak utama kemajuan bagian dikaitkan sebagai satuan kawasan setempat yang sah. Bagian juga merupakan unit homogenitas dalam warga sederhana dengan pekerjaan yang homogen. Pandangan Viswanadham dan Vedula, bagian yang cerdas dicirikan sebagai penggunaan TIK untuk serangkaian layanan yang digunakan oleh warga secara keseluruhan dan mencakup berbagai aktivitas yang tidak dapat disangkal didasarkan pada empat aspek (empat): sumber daya yang cemerlang, inovasi yang cerdas, fondasi yang cerdas, dan kecerdasan yang cemerlang. rantai bantuan. (Maharani dan Kencono, 2021)

Bagian Cemerlang diketahui bahwa program strategi yang menjadikan bagian mampu dan siap mengatasi permasalahannya sendiri secara tajam dan menjadi bagian yang mampu dan layak memanfaatkan inovasi terkomputerisasi untuk menumbuhkan potensi di tingkat bagian, termasuk potensi industri perjalanan. Ide lainnya, pelaksanaan bagian pintar di Indonesia masih belum ideal. Masih banyak celah yang ditemukan antara pengujian hipotetis dan praktik dalam menjalankan bagian cerdas, bertujuan untuk menciptakan warga yang memahami inovasi tidak hanya untuk menggarap sifat SDM, namun hadirnya program bagian cerdas akan meningkatkan kelangsungan hidup. inovasi berbasis perbaikan industri perjalanan (komputerisasi industri perjalanan).

menjadi lebih baik dan sejahtera, meningkatkan perhatian warga untuk terus meningkatkan pertumbuhan usaha swasta yang berpotensi menciptakan bisnis, dan memperbaiki sifat administrasi di bagian sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi daerah setempat. Sesuai dengan Undang – Undang Desa No 6 Tahun 2014, secara detail menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Ley 25.632, 2020).

Pandangan *Viswanadham* dan *Vedula* sebuah desa cerdas diketahui bahwa wilayah lokal dimana penduduknya menggunakan TIK melakukan berbagai kegiatan untuk menjadi lebih efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan ini berada di bawah kategori “sumber pintar”, “teknologi cerdas”, “institusi cerdas” dan “jaringan layanan cerdas” (Maharani & Kencono, 2021).

Tetapi menurut teori yang berlaku, sebuah desa pintar adalah komunitas yang memiliki kemampuan untuk menggunakan TIK untuk membangun bangunan yang sangat dan menarik dan produktif yang sepenuhnya bertujuan untuk menciptakan kepuasan pribadi bagi penghuni wilayah tersebut (Baru dkk, 2019).

Program diketahui bahwa jenis dorongan atau strategi yang dilaksanakan oleh otoritas publik untuk mencapai tujuan tertentu. Program apa pun yang ada akan mempermudah memilah dan melaksanakan tugas

yang telah selesai. Program ini bukan sekadar tindakan tunggal yang dapat diselesaikan tanpa keterlibatan; sebaliknya, hal ini harus diselesaikan dalam jangka panjang dan dengan partisipasi untuk memahami tujuan tertentu. Untuk memeriksa keberhasilan program tertentu, David Korten meringkas proses belajar atau, lebih tepatnya, apa yang dikenal sebagai model implementasi program yang memenuhi persyaratan (Aziz & Putri, 2021)

Model kewajaran pelaksanaan program menurut David Korten menggambarkan bahwa di dalam model ini terdapat tiga komponen pusat yang ada dalam sebuah pengadaan program. Dilihat dari tiga komponen pusat di bawahnya, menyatakan bahwa suatu program akan berhasil di laksanakan jika terdapat kesesuaian, tiga unsur implementasi program (Aziz & Putri, 2021).

- a) Kesesuaian antara program dengan pemanfaat kesesuaian antara program dengan pemanfaatan merujuk pada sejauh mana suatu perangkat lunak memenuhi kebutuhan dan tujuan penggunaannya, ini mencakup kinerja, fungsionalitas, dan kemampuan program untuk memenuhi harapan atau kebutuhan pengguna.
- b) Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksanaan mengacu pada sejauh mana perangkat lunak dapat diintegrasikan dengan beroperasi sesuai dengan lingkungan dan proses yang ada di dalam organisasi tersebut. Ini mencakup ketersediaan fitur yang sesuai, integrasi dengan sistem yang

ada, dan kemampuan program untuk mendukung tugas dan kebutuhan khusus organisasi pelaksana.

- c) Kesesuaian antara kelompok pemanfaat merujuk pada sejauh mana program atau produk dapat memenuhi kebutuhan dan harapan dari berbagai kelompok pengguna atau pemangku kepentingan yang terlibat. Ini mencakup pemenuhan fitur, fungsionalitas, antara muka pengguna yang relevan untuk setiap kelompok, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi semua pihak yang terlihat.

4. Pelayanan Publik

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, administrasi publik menjadi mulai banyak diteliti, dengan alasan bahwa administrasi publik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil pelaksanaan kemandirian daerah. Apabila pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah provinsi bagus/berkualitas, maka penyelenggaraan kemandirian wilayah diharapkan dapat berhasil. Terlebih pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum dan menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah. Namun sayang disayangkan hampir semua daerah memiliki masalah yang sama, yaitu kualitas pelayanan publik yang masih kurang baik (Suryana et al., 2021).

Bantuan publik diketahui bahwa suatu bentuk dorongan atau serangkaian latihan yang berarti memenuhi kebutuhan bantuan publik sesuai dengan materi peraturan dan pedoman serta warga atas produk, jasa, dan/atau jasa administrasi yang disediakan oleh pegawai negeri sipil (Adawiyah, 2018). Secara umum, dapat dikatakan bahwa bantuan dapat mencakup dan

mengembangkan lebih lanjut upaya-upaya untuk mencapai tujuan, dan hal ini dilakukan oleh orang-orang yang memberikan kontribusi terbaik melalui titik acuan yang telah ditetapkan. Penpengajars Administrasi merupakan Penpengajars Interaksi, khususnya Penpengajars yang Mengarahkan dan Mengendalikan Siklus Administrasi, sehingga Komponen Peraksi Pendampingan Dapat Berjalan Sistematis, Mudah, Tepat Pada Jalurnya dan Baik bagi Pihak-pihak yang Perlu Melayani. Bantuan publik diketahui bahwa suatu bentuk aksi yang dilakukan oleh suatu kelompok atau suatu otoritas dengan tujuan akhir untuk memberikan dukungan kepada warga untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi kependudukan, yang saat ini terletak di pemerintahan tertentu, adalah yang pertama dari kegiatan pelayanan publik (Rastillah, 2020).

Penjelasan lain yang disampaikan oleh Dinas Penguatan Perakitan Negara menyatakan bahwa pelayanan sudah cukup memadai untuk kebutuhan seluruh warga. Pada awalnya, administrasi dapat diperlakukan secara pribadi, berkumpul, atau didirikan secara konsisten sehingga persyaratannya terpenuhi. Pertemuan yang disetujui untuk situasi ini diketahui bahwa penduduk negara masing-masing. Pekerjaan yang diselesaikan oleh individu yang mempunyai kepentingan terhadap tenaga kerja dan produk. Menurut teori, perlu untuk mempertimbangkan terjemahan, akuntabilitas, konsistensi, partisipasi, kesamaan hak, dan keseimbangan hak untuk benar menangani masalah yang ada (Fais & Maradian, 2022).

Selain itu, sudah menjadi kewajiban pula bagi pemerintah/pemerintah provinsi untuk mengerjakan berbagai macam administrasi yang diberikan kepada daerah setempat. Persoalan mengenai sifat administrasi publik juga dipicu oleh dampak perubahan dalam pandangan dunia ilmu regulasi, termasuk perubahan global yang terjadi dalam berbagai permasalahan sehari-hari dan di berbagai wilayah di dunia. Perkembangan pemerintahan baru terhambat oleh deklarasi bantuan terbuka. Survei opini publik tentang kepemimpinan masyarakat dapat dihubungkan dengan praktik kepemimpinannya yang inovatif (Nurlukman et al., 2023)

Faktanya, otoritas administrasi dapat memanfaatkan inovasi data dan kosumber datasi TIK untuk menyelesaikan upaya pemerintah, menangani kosumber datasi dengan warga umum, dan meningkatkan tanggung jawab dan keterusterangan individu, dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dari mereka yang mengeluarkan pengumuman publik (Tasyah et al., 2021). Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengembangan sistem informasi pemerintah suatu negara mungkin cukup menguntungkan (Aristoni, 2020).

Administrasi publik yang ideal dapat menjadikan pemerintahan bagian yang mahir, produktif dan kuat, terbuka dan dapat diandalkan atau pemerintahan yang hebat dan administrasi publik harus ditujukan untuk memperhatikan dan mengubah kesalahan pendekatan yang berbeda dari strategi sebelumnya dan saat ini serta tindakan kelembagaan yang ada. Perubahan bantuan publik harus mencakup perubahan penting dalam

jadwal kerja manajerial, budaya peraturan, dan prosedur kerja instansi pemerintah guna memungkinkan dikembangkannya kepemimpinan yang berwatak kerakyatan pada birokrasi publik (Studi & Administrasi, 2020).

Pemberian bantuan publik oleh otoritas publik kepada individu jelas merupakan pelaksanaan tugas otoritas publik sebagai agen individu. Oleh karena itu, pemanfaatan administrasi publik oleh organisasi pemerintah menjadi sangat penting karena akan membantu warga memahami seberapa baik otoritas publik dapat mengakomodasi kebutuhan warga secara keseluruhan. Ini akan membantu orang-orang memahami seberapa baik negara telah melaksanakan tujuan yang diperintahkan (Kasus et al., n.d.).

Dari beberapa pengertian administrasi publik terus-menerus yang telah diuraikan di atas, dalam kaitannya dengan pemerintahan teritorial, bantuan publik dapat diartikan sebagai pemberian bantuan atau pelayanan terhadap kebutuhan perorangan atau daerah serta berbagai perkumpulan yang berkepentingan terhadap hal tersebut. asosiasi, sesuai dengan prinsip dan sistem penting. masih belum jelas dan bertujuan memberikan pemenuhan kepada penerima manfaat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan layanan baik dan profesional.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah model yang menggambarkan bagaimana hubungan teori yang satu dengan yang lainnya. Yang menjelaskan tentang masalah yang ada, dan kerangka pikir akan menghubungkan antara variabel mana saja yang terkait. Dan teori yang digunakan pada kerangka pikir yaitu teori David Corten (2008).



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

Teori David Corten

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian ditentukan berdasarkan hasil dari studi pendahuluan, referensi, pengalaman serta saran dari orang yang dipandang ahli. Fokus dalam penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan (Basuki, 2021).

Fokus penelitian berfungsi sebagai pembatas objek kajian yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu Peningkatan akses digital, Partisipasi Masyarakat, Keberlanjutan.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus adalah sebuah kata yang sering banyak orang gunakan dalam menyampaikan maksud tertentu. Fokus adalah sebuah kata yang terkadang kita sering lupa akan makna dari kata itu sendiri, karena begitu banyak rencana yang ingin di jalankan atau luput dari perhatian karena kesibukan yang mendera dari waktu-waktu yang semakin menjauhkan dari makna kata fokus itu sendiri.

Fokus pada penelitian ini yaitu :

1. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat : kesesuaian antara program dengan pemanfaatan merujuk pada sejauh mana suatu perangkat lunak memenuhi kebutuhan dan tujuan penggunaannya. Ini mencakup kinerja, fungsionalitas, dan kemampuan program untuk memenuhi harapan atau kebutuhan pengguna.
2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana : kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana mengacu pada sejauh mana perangkat lunak dapat diintegrasikan dengan beroperasi sesuai dengan lingkungan dan

proses yang ada di dalam organisasi tersebut. Ini mencakup ketersediaan fitur yang sesuai, integrasi dengan sistem yang ada, dan kemampuan program untuk mendukung tugas dan kebutuhan khusus organisasi pelaksana.

3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat : kesesuaian antara kelompok pemanfaat merujuk pada sejauh mana program atau produk dapat memenuhi kebutuhan dan harapan dari berbagai kelompok pengguna atau pemangku kepentingan yang terlibat. Ini mencakup pemahaman dan pemenuhan fitur, fungsionalitas, dan antar muka pengguna yang relevan untuk setiap kelompok, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini selesai kira-kira sebulan setelah seminar proposal. Daerah penelitian diketahui di Desa Rante Mario Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju.

B. Jenis Penelitian Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diketahui bahwa penelitian subyektif. Penelitian subyektif diketahui bahwa penelitian yang menggunakan strategi, langkah dan metodologi yang mencakup informasi dan data yang diperoleh melalui sumber data sebagai subjek yang dapat mengkomunikasikan tanggapan dan sentimennya sendiri untuk mendapatkan bentuk umum yang komprehensif tentang hal yang diteliti.

2. Tipe Penelitian

3. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diketahui bahwa penelitian ekspresif. Penelitian yang mencerahkan diketahui bahwa strategi penelitian yang menggambarkan kualitas warga atau kekhasan yang sedang dipertimbangkan. Jadi titik fokus mendasar dari strategi penelitian ini diketahui bahwa untuk memahami objek penelitian. Dengan tujuan menjawab peristiwa atau keanehan apa yang terjadi.

C. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari suatu objek yang ada diteliti (responden) atau diperoleh informasi dasar di lapangan, instrumen yang peneliti gunakan yaitu wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu Informasi opsional tambahan diketahui bahwa data yang diperoleh dengan membaca atau berkonsentrasi pada perpustakaan, buku atau tulisan yang berhubungan dengan masalah, Web, catatan institusi dan laporan yang berhubungan dengan kebutuhan data penelitian.

D. Informan

Pandangan Moleong (2006; 132) dalam buku Strategi Penelitian Subjektif, “Sumber diketahui bahwa orang-orang yang digunakan untuk memberikan data tentang keadaan dan keadaan dasar penelitian. Selanjutnya pandangan Arikunto (2006; 145), sumber diketahui bahwa seseorang yang memberikan data.

Dengan demikian, data yang diperoleh bisa dikatakan setara dengan sumber data, dan penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan strategi penelitian purposif, khususnya menentukan jumlah sumber yang dipilih, yaitu:

Tabel 3.1 Tabel Informan

No	Nama	Inisial	Jabatan
1.	I Komang Wisnu Wardana S.sos		Kepala Desa Rante Mario
2.	Made Sandya		Sekretaris Desa Rante Mario
3.	Rosmah		Masyarakat
4.	Kartini		Masyarakat
5.	Muchtar		Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan informasi penelitian ini dapat diterapkan dalam berbagai kondisi, dari berbagai sumber, dan dalam berbagai cara. Oleh karena itu diperlukan suatu prosedur pengumpulan informasi yang dapat digunakan dengan cepat dan pasti sesuai dengan masalah penelitian dan sasaran penelitian, sehingga ahli menggunakan beberapa strategi yang dapat membuat penelitian ini lebih mudah, tepatnya.

1. Observasi

Observasi diketahui bahwa strategi pengumpulan informasi di mana observasi dibuat dengan memasukkan catatan tentang kondisi atau perilaku item tujuan. Untuk situasi ini, ahli menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati secara langsung terkait dengan pelaksanaan e-administrasi dalam peningkatan bagian administrasi cemerlang di bagian Rante Mario, sub-wilayah Tommo, wilayah Mamuju .

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu pendekatan pengumpulan data dengan cara memimpin pertemuan langsung (surat menyurat langsung)

dengan saksi-saksi sesuai jenis informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam suatu pertemuan, terdapat siklus intuitif antara penanya dan saksi.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk menyempurnakan teknik tersebut observasi dan wawancara, serta meningkatkan keakuratan dan kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan dokumenter industri dan dapat digunakan sebagai bahan untuk memverifikasi keakuratan informasi.

F. Teknik analisis data

Strategi penyelidikan informasi yang digunakan bersifat ilustratif, yaitu mengumpulkan, mengorganisir dan memahami informasi-informasi yang ada yang diperoleh secara lengkap dari lapangan, baik informasi yang diperoleh dari pertemuan, dokumentasi atau bahan-bahan lain secara metode.

- 1) Reduksi kata: proses pengurangan volume atau kompleksitas data dengan tujuan untuk menghasilkan dataset yang lebih kecil, tetapi masih mempertahankan informasi yang penting atau relevan. Tujuan utama dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data sehingga data lebih mudah dikelola, diproses, atau analisis, tanpa kehilangan makna atau informasi yang signifikan.
- 2) Penyajian data : proses mengkomunikasikan informasi yang terkandung dalam data dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh orang lain. Tujuan utama dari penyajian data adalah untuk mengubah data yang mungkin rumit atau tidak terstruktur menjadi bentuk yang lebih

terorganisir, jelas, dan informatif. Ini membantu individu atau organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang data tersebut.

- 3) Verifikasi : proses pengujian, pemeriksaan, atau konfirmasi terhadap kebenaran atau keabsahan suatu informasi, pernyataan, atau data. Tujuan utama dari verifikasi adalah untuk memastikan bahwa informasi atau data tersebut benar, akurat, dan sesuai dengan standar atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Proses verifikasi biasanya melibatkan Langkah-langkah seperti pengumpulan bukti, pengecekan fakta, atau perbandingan data dengan sumber yang sah.

G. Teknik Pengabsahan Data

Metode legitimasi informasi dilakukan untuk menunjukkan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian logis untuk mengtes informasi yang diperoleh. Strategi persetujuan informasi terdiri dari tiga, yaitu triangulasi sumber spesifik, triangulasi khusus, dan triangulasi waktu. Klarifikasinya diketahui bahwa sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber, khususnya pengujian keterpercayaan suatu informasi, dilakukan dengan memeriksa informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber. Informasi yang didapat dipecah oleh para ilmuwan untuk mencapai tujuan.
2. Strategi triangulasi, khususnya mengtes keterpercayaan suatu informasi, dilakukan dengan benar-benar melihat informasi terhadap sumber yang serupa dengan berbagai metode. Misalnya, pengecekan informasi dapat

dilakukan melalui wawancara, persepsi, dokumentasi .

3. Triangulasi Waktu, yaitu informasi yang dikumpulkan melalui prosedur wawancara menjelang awal hari ketika sumbernya masih baru, akan memberikan informasi yang lebih sah sehingga lebih dapat dipercaya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Deskripsi Desa Rante Mario

Desa Rante Mario berada di kecamatan tommo kabupaten Mamuju provinsi Sulawesi barat, Desa Rante Mario pertama kali di bentuk oleh unit pemukiman transmigrasi (UPT) yang terletak di kaki gunung batu ukir. Desa Rante Mario di buka pada tanggal 19 desember tahun 1993 dan pertama kali di huni 22 kepala keluarga yan berasal dari kabupaten pinrang Sulawesi Selatan kemudian di susul 50 kepala keluarga dari kabupaten gowa bili-bili dan di tambah lagi dari bali 30 kepala keluarga. Berdasarkan data geografis tahun 2021 jumlah penduduk Desa Rante Mario sebanyak 1268 orang, laki-laki berjumlah 657 orang dan perempuan 611 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 364.

Dan sebelum desa tommo VI pada tahun 1995 lalu di ganti menjadi Desa Rante Mario atas permintaan Bapak Bupati karena nama ini diabadikan dengan nama Perusahaan yang pertama kali trasmigrasi tommo VI.

Luas wilayah Desa Rante Mario 940 hektar, pemukiman 157 hektar, pertanian atau perkebunan 70 hektar, pekarangan 150 hektar, sawah 270 hektar, tanah kas desa (TKD) 12 hektar, tanah kuburan 2,2 hektar, dan tanah pertokohan (pasar) 1 hektar. Sedangkan iklim pada Desa Rante Mario sama

dengan desa-desa lain yang ada di kabupaten Mamuju dan jarak Desa Rante Mario dari kabupaten Mamuju yaitu 125 km dari provinsi berjarak 130 km.

Adapun letak geografis yang berbatasan langsung dengan Desa Rante Mario yaitu.

- a. sebelah utara berbatasan dengan desa Kakulasan,
- b. sebelah dengan berbatasan dengan timur Kakulasan,
- c. sebelah selatan berbatasan dengan desa Rante Mario,
- d. dan sebelah barat berbatasan dengan desa Tamejarra.

Di Desa Rante Mario juga terdapat 6 dusun pertama dusun Giri Parta, kedua dusun Amaliyah, ketiga dusun Wana Sari, ke empat dusun Mekar Sari, ke Lima Wai Tuwo, ke enam Dusun Lestari.

Desa adalah tulang punggung, penopang perekonomian daerah, baik berupa sumber daya manusia yang berkelanjutan, ketersediaan logistik pangan, dan wadah untuk membuka tali persatuan dan kesatuan, toleransi agama, budaya dan etnis dari berbagai lapisan dasar kondisi Masyarakat Rante Mario dalam pengertian luas, ini menjadi inti yang harus diperbaiki dan dibangun.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara singkat visi Pembangunan desa Rante Mario adalah:

“Mendorong Tercapaiannya Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan.”

Adapun misi Pembangunan desa Rante Mario yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur desa

2. Perbaikan akses ke sentra-sentra pertanian dan Perkebunan sebagai sektor unggulan.
3. Peningkatan sumber daya manusia (SDM)
4. Penguatan kelembagaan sosial dan ekonomi desa
5. Peningkatan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
6. Memaksimalkan potensi dan peran pemuda
7. Megutamakan pelayanan kepada Masyarakat
8. Memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara optimal untuk kesejahteraan Masyarakat.

2. Profil *Smart Village*

Desa Rante Mario adalah salah satu desa yang secara administrasi berada didalam wilayah kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Desa Rante Mario secara ini cukup jauh dari perkotaan dan berada di dataran pegunungan, namun suatu pencapaian karena desa ini memiliki jaringan internet yang sudah merata dan hampir tidak ada *blank spot* serta desa ini masyarakatnya sudah menggunakan internet dalam kehidupan sehari-harinya. Dan dengan ini juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dasar pemerintahan dan Masyarakat serta untuk melakukan peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan Masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan menuju kesejahteraan dan kemandirian Masyarakat desa dalam meningkatkan ekonomi lokal. Dengan adanya partisipasi masyarakat berupa sosialisasi pemberdayaan masyarakat pada desa Rante Mario berupa kearifan lokal

melalui pengenalan internet dan ketersediaan infrastruktur digital yang memadai berupa seperti akses internet yang cepat dan stabil, jaringan komunikasi yang handal, dan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Teknologi informasi yang di gunakan di desa Rante Mario berupa pembuatan jurnal dan konten creator.

Pencapaian desa *smart village* Rante Mario pada bidang pendidikan yaitu pembelajaran, ketersediaan perpustakaan yang membantu penduduk desa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Partisipasi masyarakat sangat baik dengan kompak mengikuti setiap perlombaan yang di adakan pemerintah desa Rante Mario.

Yang mendirikan *smart village* yaitu pemerintah desa Rante Mario, desa Rante Mario terpilih menjadi salah satu desa cerdas fase II yang dinaungi oleh kementerian desa (P3PD) Sub 2C2 dengan direktornya kader digital desa Rante Mario pada keputusan kepala desa Rante Mario no. 20 tahun 2022. Alasan di terapkan desa *smart village* di desa Rante Mario untuk membangun desa Rante Mario supaya tidak tertinggal dan kurang *update* terhadap perkembangan teknologi dan informasi.

Adapun syarat yang menjadikan desa Rante Mario sebagai desa cerdas yaitu memiliki akses internet yang memadai, Listrik yang memadai, potensi desa Rante mario yang merupakan penghasil sawit

sehingga membuat perekonomian di desa ini cukup pesat. Adapun visi dan misi desa cerdas yaitu sebagai berikut:

a. Visi

Visi dari Pembangunan desa cerdas yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat desa dengan pemanfaatan teknologi untuk akselerasi Pembangunan ekonomi desa dan peningkatan kualitas layanan Masyarakat.

b. Misi

1. Meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan Masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital (terwujudnya *smart people*)
2. Pemanfaatan teknologi untuk menunjang aktivitas perekonomian Masyarakat desa (terwujudnya *smart economy*)
3. Peningkatan sarana infrastruktur digital untuk menunjang mobilitas informasi dan komunikasi yang ada di desa (terwujudnya *smart mobility*)
4. Meningkatkan kualitas layanan pemerintahan desa dengan memanfaatkan platform digital (terwujudnya *smart governance*)
5. Pemanfaatan teknologi untuk mendorong pengelolaan sumberdaya alam desa yang bijak dan berkelanjutan (terwujudnya *smart environment*)
6. Pemanfaatan teknologi untuk memudahkan aktifitas kehidupan Masyarakat dalam kehidupan keseharian (terwujudnya *smart living*)

Adapun ciri-ciri smart village sebagai berikut :

1. Pemanfaatan teknologi desa tersebut menggunakan teknologi tik untuk meningkatkan layanan publik, termasuk akses internet yang cepat dan luas
2. Keterlibatan Masyarakat desa aktif terlibat dalam proses pengambilan Keputusan, pelaksanaan program sehingga tercipta rasa memiliki terhadap perkembangan desa
3. Pembangunan berkelanjutan desa smart village menerapkan prinsip Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
3. Pendidikan dan pelatihan terdapat program Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknologi bagi Masyarakat desa, sehingga mereka dapat mengoptimalkan manfaat dari infrastruktur digital yang ada
4. Ketersediaan layanan publik desa *smart village* menyediakan berbagai layanan publik secara efisien melalui *platfrom* digital, seperti layanan Kesehatan, Pendidikan, transportasi, dan administrasi desa.
5. Pengelolaan sumber daya alam desa desa ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat keberlanjutan Pembangunan Tingkat lokal.

B. Implementasi *E-Government* dalam Pengembangan Tata Kelola *Smart Village*

Peneliti mengangkat masalah dan menggunakan indikator teori dalam kerangka pikir untuk melakukan penelitian dan menemukan solusi. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan untuk menjawab masalah, menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis kualitatif yaitu mengungkapkan fakta-fakta dalam bentuk narasi, akan digunakan untuk menganalisis hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Di terapkannya desa *smart village* di Desa Rante Mario ini untuk mendukung program pemerintah yang berbasis elektronik perlu di tindak dalam bentuk kebijakan daerah yang mendukung percepatan pelayanan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa guna mewujudkan kesejahteraan desa melalui pelaksanaan *smart village* di desa Rante Mario. Dan penerapan di desa Rante Mario dengan adanya kesadaran masyarakat dalam penggunaan perangkat digital dasar berupa komputer dan hp merupakan salah satu literasi digital dasar di desa Rante Mario. yang masyarakat Rante Mario sudah kuasai serta pelayanan pemerintah desa yang beberapa surat menyurat sudah di lakukan secara elektronik dan berbasis online, sedangkan perkembanganya itu sendiri dari awalnya desa Rante Mario belum memiliki akses internet dan sekarang sudah memiliki akses internet yang cepat. Walaupun *smart village* ini baru berjalan sehingga belum berjalan maksimal tetapi setidaknya sudah banyak desa yang meniru dari program-programnya termasuk pemberdayaan Masyarakat tentang kearifan lokal melalui memperkenalkan kegiatan ibu-ibu rumah tangga melalui internet. *Platform* yang digunakan di Desa Rante Mario

yaitu Siskudes, bpjs/JKN Online, Website Desa dan Dukcapil Apps Terdapat 6 Pilar smart village Desa Rante Mario yaitu:

1. Mobilitas Cerdas

Pada pilar ini desa Rante Mario sudah menyiapkan satu unit mobil yang dapat digunakan Masyarakat untuk pengurusan akses ke kota untuk lebih mempermudah jadi pemerintah desa sudah menyiapkan mobil pelayanan desa, adanya pusat Kesehatan terpadu yang memudahkan perangkat desa untuk melayani Masyarakat tepat waktu.

2. Masyarakat Cerdas

Pada pilar ini desa Rante mario sudah mampu mengaplikasikan perangkat komputer dasar seperti hp sudah tersedia disetiap rumah tangga dan Masyarakat telah melakukan pemasaran produk secara online seperti menjual barang online dan padar kuliner yang dilakukan di sosmed.

3. Tatakelola Cerdas

Pada pilar ini desa Rante Mario sudah menerapkan beberapa pelayanan online seperti bpjs, JKN online, pelayanan dukcapil, pelayanan siskudes. Serta adanya keterbukaan dalam hal APBN dan APDS, website desa. Pemerintah desa menganggarkan dana desa bakal untuk launching website desa.

4. Ekonomi Cerdas

Pada pilar ini Masyarakat Desa Rante Mario telah memiliki kemampuan dasar dalam hal komputer jadi Masyarakat memanfaatkan teknologi untuk menjual produk, memasarkan produk melalui online

seperti via whatsapp contohnya barang dan makanan. Hal ini membuat ekonomi semakin maju dikalangan Masyarakat.

5. Lingkungan Cerdas

Pada pilar ini desa Rante Mario telah adanya pamsimas Dimana ada beberapa sumber mata air sehingga memudahkan Masyarakat dalam penyediaan air bersih dan pemasangan insalasi Listrik gratis. Untuk menunjang kedepannya akan ada rencana pembuatan tpa sampah.

6. Kehidupan Cerdas

Pada pilar ini di desa Rante mario pemanfaatan teknologi untuk membantu Masyarakat yang terdapat beberapa mesin pengelola hasil bumi seperti mesin dros jagung yang digunakan Masyarakat untuk memudahkan dalam memilah hasil panen serta mesin timbangan tbs yang memudahkan dalam hal penjualan hasil sawit.

Dalam hal mendukung program pemerintah diciptakan UU no 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan presiden no 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan elektronik yang perlu ditindak lanjuti dalam bentuk kebijakan daerah maka diwujudkan dan dilaksanakan smart village salah satunya didesa Rante Mario. Adapun platform yang digunakan di desa Rante mario yaitu Dukcapil, bpjs online dll.

Penulis merumuskan *Implementasi smart village* memenuhi kebutuhan dan tujuan masyarakat lokal secara inklusif dan berkelanjutan dapat di lihat dari tiga indikator yaitu ; (1) Kesesuaian antara program dengan pemanfaat atau pengguna, (2) Kesesuaian antara program dengan

organisasi pelaksana, (3) Kesesuaian, antara kelompok pemanfaat. Adapun pembahasan secara rinci hal tersebut sebagai berikut.

1. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat atau pengguna

Pentingnya memperhatikan kesesuaian program dengan pemanfaat atau pengguna, guna untuk kepentingan bersama dan memberikan kenyamanan satu sama lain dalam membangun program-program yang akan di jalankan. Dan adanya program dan pemanfaat atau pengguna ini sangatlah penting bagi *smart village*, di karenakan juga Dengan adanya kesesuaian dapat membantu desa-desa lebih berkembang dan dapat di jadikan contoh bagi desa-desa lain yang ada di kabupaten mamuju secara umum terkhususnya di kec. Tommo.

Selanjutnya dengan adanya program juga dapat lebih memenuhi kebutuhan pada desa seperti di infrastruktur digital, layanan Kesehatan, Pendidikan dan sebagainya. Memahami kebutuhan masyarakat Desa Rante Mario dapat membantu program menjadi lebih efektif dalam meningkatkan standar hidup Masyarakat terhadap penggunaan teknologi.

Dalam hal ini juga untuk mengetahui kesesuaian dengan pemanfaat atau pengguna dibutuhkan ada beberapa pertanyaan indikator. Hal yang di sampaikan oleh informan yang Bernama bapak Wayan selaku kepala Desa

Rante Mario adalah sebagai berikut:

‘‘Walaupun dalam hal ini tidak dapat di pungkiri bahwa dalam penerapannya belum cukup sistemnebel atau komplit. Tetapi dalam *make syur* sudah semua kalangan bisa mencapai atau menggunakan, sehingga di katagorikan hubungan dan kondisi saat ini tentu masih

memiliki beberapa kendala-kendala yang masih ada di desa Rante Mario tersebut. Sehingga opportunitynya, peluang-peluang, bisa kita dapatkan nantinya melalui bakat-bakat yang ada pada program *smart village* itu sendiri” (hasil wawancara: 5 februari 2024)

Membahas kepuasan pengguna itu akan lebih merujuk kepada penilaian positif yang di berikan oleh individu terhadap pengalaman dan persepsinya terhadap penggunaan suatu produk, layanan, atau sistem. Faktor-faktor seperti ketersediaan fitur, Tingkat kegunaan, dan dukungan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan penggunaan dapat secara signifikan meningkatkan Tingkat kepuasan secara keseluruhan.

Adapun hasil wawancara dari informan bapak Made selaku Sekertaris Desa Rante Mario tentang bagaimana kepuasan pengguna dalam pelayanan *smart village* yang di inginkan:

“kalau dari Masyarakat responya sangat positif daripada layanan, artinya disini daripada layanan tidak ada yang komplain dari, Masyarakat tidak ada, dan saya pikir sudah cukup baik” (Hasil wawancara :12 februari 2024)

Adapun hasil wawancara selanjutnya dengan pak desa tentang bagaimana *smart village* ini mencapai tujuan dan sasaran yang di inginkan pengguna.

“sedangkan untuk sasaran program *smart village* ini yaitu seluruh Masyarakat dan semua kalangan, agar tidak ketinggalan edukasi program desa, penerapan system ekonomi Pendidikan. Untuk mencapai ini semua tentu pihak desa sangat terbuka Ketika ada saran baru dari berbagai kalangan atau Masyarakat, tapi dalam hal ini pemerintah desa Rante Mario juga sangat memperhatikan kepuasan layanan Masyarakat dalam menerapkan *smart village* tersebut. Dan dapat di manfaatkan oleh berbagai kalangan Masyarakat.” (Hasil wawancara: 12 februari 2024).

Membahas pengembangan *smart village* tentu akan melibatkan Masyarakat dalam penerapan teknologi, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal. Dan mencakup pelatihan teknologi bagi Masyarakat agar nantinya dapat mengoptimalkan keuntungan dari perangkat pintar dan sistem digital. Kolaborasi dengan sektor swasta juga nantinya akan di perlukan untuk memadai dan dukungan finansial. Selain itu juga, promosi kewirausahaan di Tingkat lokal dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang kerja baru. Dengan itu pemerintah harus menyesuaikan apa-apa saja Solusi teknologi dan Pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan Masyarakat setempat. Pendekatan dengan berbasis kebutuhan Masyarakat akan membantu desa pintar tidak hanya efisien secara teknologi tetapi juga memenuhi aspirasi dan kebutuhan Masyarakat.

Adapun hasil wawancara dengan salah satu Masyarakat yang berinisial R tentang bagaimana Upaya pengembangan *smart village* di desa Rante Mario.

“Saya merasa cukup terbantu dengan adanya penerapan ini membuat lebih membantu dalam mengakses informasi dan layanan publik, sementara ada juga kekhawatiran atau saran.” (Hasil wawancara : 25 februari 2024)

Kesimpulan dari hasil wawancara peneliti diatas kepada informan dapat disimpulkan bahwa program-program yang akan di jalankan nantinya dapat membantu masyarakat desa agar tidak ketinggalan oleh desa-desa lain yang sudah lebih dulu menerapkan *smart village* di desanya dan membantu masyarakat untuk lebih maju dan jauh lebih berkembang lagi.

2. Kesesuaian antara Program dengan Organisasi Pelaksana

Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana mengacu pada sejauh mana program tersebut dapat berintegrasi dan menjadi tujuan yang sesuai dengan struktur, nilai, dan kebutuhan organisasi.

Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana sangat penting dilakukan agar memiliki kepercayaan untuk menjalankan program-program berkelanjutan. Sesuai dari hasil wawancara yang penulis lakukan, dimana informan yang bernama Wisnu selaku Kepala Desa Rante Mario tempat penulis lakukan penelitian adalah:

“Pentingnya konsistensi program dengan organisasi pelaksana untuk memiliki kepercayaan satu sama lain. Tentu dengan adanya konsistensi juga akan berdampak baik untuk keberlanjutan program-program yang akan dijalankan, tetapi tidak dapat di pastikan seperti apa kedepannya karena dengan adanya metode i’ai tentu kita akan berusaha mengikuti. Seperti kita juga di katakana memiliki sumber daya manusia (SDM) yang belum mempunih tetapi Adapun sumber daya manusia (SDM) yang mempunih seperti dengan desa-desa yang sudah lebih dulu menjadi desa pintar (*smart village*). Akan tetapi kita tidak akan berhenti sampai disini namun Ketika kita lihat dari video ini kurang menemukan secara otomatis. Namun tidak akan berhenti disini pemerintah desa akan mengakomodasi dan memprogramkan setiap tahun melalui internet desa atau lainnya.” (Hasil wawancara: 5 februari 2024)

Beberapa telah menunjukkan kesiapan yang dimana sudah cukup memadai dengan teknologi yang canggih, dan mungkin juga akan mendapatkan tantangan terkait kurangnya sumber daya atau keahlian teknis atau keseluruhan. Keberhasilan ini juga sangat terkait dengan sejauh mana organisasi dapat mengelola dan memadukan sumber daya digital untuk mencapai tujuan program tersebut.

Seperti hasil wawancara selanjutnya dengan bapak Made selaku Sekretaris Desa Rante Mario bagaimana kesiapan sumber daya organisasi ruang komunikasi digital dalam memadahi program *smart village*.

“kalua di bilang dukungan tadik iya dia sangat mendukung dari pada program ini itu yang kita bahas di musyawarah desa dan apa yang dia lakukan di lapangan berdasarkan hasil survei yang dia lakukan dan di sampaikan ke desa, mana-mana yang bisa kita heandel daripada kader desa itu juga ada dari kabupaten mungkin ada pendataan disitu jadi kita bisa berpartisipasi di situ yang tidak bisa laksanakan cuman dia tetap membantu kita untuk singkrongkan.”(Hasil wawancara:8 februari 2024).

Kesesuaian dapat bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat mendukung tujuan dan prinsip program. Beberapa kebijakan juga telah dirancang secara optimal untuk memfasilitasi perkembangan desa pintar. Sementara ada juga yang mungkin memerlukan penyesuaian agar lebih sesuai, evaluasi terhadap konsistensi antara kebijakan dan tujuan program *smart village* dapat memberikan gambaran yang lebih baik mengenai apakah diperlukan penyesuaian atau pengembangan kebijakan yang lebih mendalam.

Selanjutnya seperti hasil wawancara dari bapak Wisnu selaku Kepala Desa Rante Mario tentang bagaimana kesesuaian kebijakan dengan program *smart village*:

“Dalam hal ini juga sudah dapat di katakana sangat sesuai karena kebijakan terkadang dapat ditutupi dengan perkembangan, dan terkadang juga bukan teknologi yang ikut tetapi kebijakan yang mengikuti perkembangan teknologi. Tidak semjua kebijakan mengikuti yang Namanya akurasi, akomodasi, akan tetapi kita merupakan sistem pemerintahan yang paling bawah dan struktur pemerintahan yang ada mulai dari pusat daerah, provinsi, kabupaten, kota dan lain sebagainya, sehingga kita tetap merencanakan bagaima kita meningkatkan kualitas di ruang digital organisasi ini (Hasil Wawancara: 5 Februari 2024).

Dukungan organisasi Ruang Komunikasi Digital ini sangat berpengaruh terhadap penerapan program *smart village* yang nantinya akan dijalankan dan sangat bervariasi dan beberapa organisasi telah proaktif menyediakan infrastruktur teknologi yang diperlukan, sehingga mempermudah jalannya program secara efisien. Namun disisi lain juga terdapat kendala dalam menyediakan sumber daya atau keahlian teknis yang di butuhkan, dan keberhasilan implementasi program *smart village* juga sangat ditentukan oleh sejauh mana organisasi dapat memberikan dukungan yang memadai dan mengintegrasikan sumber daya digital untuk mencapai tujuan program tersebut nantinya.

Dari hasil wawancara dengan bapak Made Selaku Sekertaris Desa Rante Mario tentang bagaimana dukungan organisasi ruang komunikasi digital terhadap implementasi atau penerapan program *smart village*.

“kalau sumber daya organisasi secara efisien karena dia ada jadwalnya untuk kelapangan organisasi ruang komunikasi digital ini dari kader-kader karena ada jadwalnya setiap bulan. Dia menjadwalkan itu turun ke lapangan seperti dalam pendataan apa karena itu rutin setiap bulan. Makanya kita itu dari desa itu memahami ada berapa lansia, disabilitasnya, ada berapa kepala keluarga, orang tidak mempunya, karena permasalahan itu setiap bulanya tidak sama makanya itu efektif di lakukan” (Hasil wawancara: 8 februari 2024)

Membahas tentang meningkatkan peluang ekonomi lokal ini dapat terjadi melalui pengadopsian teknologi untuk usaha kecil, pelatihan keterampilan terkait industri teknologi, dan promosi produk lokal melalui platform daring. Upaya ini tidak hanya membuka peluang pekerjaan di Tingkat lokal, tetapi juga memperluas akses pasar serta meningkatkan keterlibatan komunitas dalam ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Adapun hasil

wawancara dari salah satu masyarakat yang berisial K tentang apakah *smart village* ini dapat meningkatkan peluang ekonomi lokal.

“Dalam desa pintar, peningkatan ekonomi lokal ini dapat terjadi karena usaha kecil, melalui pelatihan keterampilan juga cukup membantu kami untuk meningkatkan peluang ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dan dapat memberikan inovasi bisnis dan memberikan dampak positif terhadap desa.” (Hasil wawancara: 25 februari 2024)

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana sangat penting untuk dilakukan. Sebab, dari kesesuaian yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan dampak positif terhadap program organisasi yang akan dijalankan, dan juga dapat mendukung infrastruktur Pembangunan di desa agar lebih berkembang. Dengan adanya konsistensi dalam menjalankan program walaupun dalam menjalankan terdapat tantangan di sumber daya manusia, tetapi akan berupaya untuk mengikuti metode i'ail dan akan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Namun dalam hal ini pemerintah desa sangat mendukung masyarakat untuk lebih memahami infrastruktur teknologi yang pada akhirnya berkontribusi pada kegunaan program yang akan di jalankan nantinya.

3. Kesesuaian antara kelompok dengan pemanfaat

Kesesuaian antara kelompok dengan pemanfaat dapat dilihat pada sejauh mana karakteristik atau kebutuhan kelompok tersebut sama dan sesuai pada kebutuhan atau tujuan pemanfaatnya. Sehingga ini dapat digunakan untuk lebih memahami kebutuhan atau kondisi yang dialami oleh pemanfaatnya.

Membahas kesesuaian tujuan atau target dari kelompok kader *smart village* ini yaitu bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas hidup dan untuk Pembangunan berkelanjutan di desa melalui tingkat pemanfaatan teknologi. Dan sasarannya itu peningkatan literasi teknologi, pelatihan keterampilan, implementasi Solusi, teknologi, pengembangan usaha lokal, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan dan menciptakan aspek ekonomi dan sosial.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan bapak Wisnu Selaku kepala desa Rante Mario bagaimana kesesuaian tujuan atau target dari kelompok kader *smart village*-nya kepada narasumber.

”Target desa cerdas ini belum bisa di tentukan bagaimana titik target yang akan di dapatkan, karena dia bersifat fluktuasi sehingga otomatis kita akan bandingkan setiap tahunnya atau bisa setiap bulan jadi otomatis kita tidak memiliki target dan berjalan begitu saja tetapi kita mengusahakan agar Masyarakat bisa memanfaatkan potensi-potensi yang dia miliki.” (Hasil Wawancara: 12 februari 2024)

Tingkat partisipasi dan keterlibatan kelompok kader dalam program *smart village* adalah elemen kunci untuk kesuksesan inisiatif tersebut. Yang dapat mencakup pembahasan tentang strategi peningkatan partisipasi masyarakat, implementasi kebijakan, serta langkah-langkah yang mendukung terciptanya keterlibatan dalam pelaksanaan program *smart village*.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Wisnu Selaku kepala Desa Rante Mario tentang Tingkat partisipasi dan keterlibatan kelompok kader desa cerdas dalam program *smart village*,

“Partisipasi kader bersifat spesifik kalau khusus kader program ini kita masih berproses, maka dari itu kita akan bermitra bagaimana kita menciptakan ruang yang dapat menumbuhkembangkan minat bakat di bidang digital kemudian dapat dimanfaatkan untuk kemajuan desa kita. Kelompok kader Ruang Komunikasi Digital baru berjalan sehingga dia baru menjalankan programnya jadi bagaimana kita bisa menutupi kekurangannya dan menutupi kekurangan kita sehingga bersinergi dalam mengembangkan *smart village* program-program yang sudah ada atau mengembangkan program kedepan” (Hasil wawancara: 12 februari 2024).

Pemerintah desa mestinya harus memastikan segala kebutuhan dan harapan desa. Pemerintah juga harus terbuka, menyediakan Latihan dan keterlibatan aktif dalam proses pengambilan Keputusan, serta memberikan pengakuan yang layak atas peran kontribusi yang mereka berikan.

Adapun selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Made Selaku Sekertaris Desa Rante Mario tentang bagaimana program *smart village* ini memenuhi kebutuhan dalam ekspektasi kelompok kader desa.

”memang tidak bisa, terus terang kita tidak bisa bandingkan karena kepuasan itu semua orang apapun bentuknya selalu pasti merasa tidak puas, cuman nantinya disitu kita bisa menganggap cukup puas, karena tidak ada problem di dalam kegiatan ini beda kalau banyak problema jelas masyarakat ada komplain dan ada rasa kurang puasnya” (Hasil wawancara: 8 februari).

Kelompok desa cerdas menerapkan desa cerdas melalui pendekatan strategis dengan memberikan pelatihan teknologi kepada warga desa, memanfaatkan sumber daya lokal, serta menjalankan dengan organisasi kader digital, duta digital dan pemerintah. Serta mengembangkan infrastruktur digital dan penyediaan akses informasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Hasil wawancara selanjutnya dengan bapak Wisnu Selaku kepala Desa Rante Mario tentang bagaimana kelompok kader desa cerdas ini mengimplementasikan *smart village*

“sedangkan kondisi saat ini sudah cukup baik, karena kita sudah memiliki sumber daya manusia aparat desa rata-rata sudah mempunyai di bidangnya tentu dengan bimbingan dan dukungan dari berbagai kalangan untuk membina dan menerapkan sehingga kita mampu mengubah daripada apa bagaimana itu desa cerdas kemudian bagaimana desa sehat dan lain sebagainya” (Hasil Wawancara: 5 Februari 2024).

Hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa masyarakat desa terlibat aktif dalam proses pembangunan *smart village*. Keterlibatan mereka mencakup partisipasi dalam perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan teknologi. Hal ini menunjukkan adanya rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap perkembangan desa.

Adanya hambatan dalam desa pintar atau *smart village* ini yang akan menjadi penghambat dalam menjalankan program-programnya, dan contoh yang menjadi penghambat biasanya kurangnya sumber daya, minimnya pemahaman teknologi di kalangan Masyarakat sebagian besar, serta tantangan regulasi dan keamanan data yang harus diawasi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu Masyarakat “M” (25 Februari 2024) yang mengatakan:

“perlu dilakukan peningkatan pemahaman Masyarakat tentang teknologi, sumber daya yang efektif, dan pemerintah juga harus melaksanakan pelatihan untuk mengajari Masyarakat seperti saya sendiri agar lebih memahami teknologi yang nantinya akan di gunakan” (Hasil wawancara: 25 februari 2024).

Hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait teknologi, mengoptimalkan sumber daya secara efektif, dan mendorong pemerintah untuk melaksanakan pelatihan. Dalam konteks *smart village*, peningkatan pemahaman teknologi sangat penting agar masyarakat dapat mengadopsi solusi pintar dengan lebih baik. Sumber daya yang efektif juga perlu dikelola untuk mendukung implementasi *smart village* secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah memiliki peran krusial dalam menyelenggarakan pelatihan yang dapat memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami dan mengelola teknologi yang diperlukan untuk mencapai tujuan *smart village*. Keseluruhan, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sumber daya yang efektif menjadi kunci untuk menghadirkan *implementasi* dan membangun *smart village* yang sukses..

C. Pembahasan

Teori implementasi ini menggambarkan kebijakan sebagai proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi yang terkait. Dengan demikian, teori ini membantu dalam memahami kompleksitas dan dinamika yang terlibat dalam menerapkan kebijakan publik dalam praktiknya.

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, penulis merumuskan *Implementasi smart village* memenuhi kebutuhan dan tujuan masyarakat lokal secara inklusif dan berkelanjutan dapat di lihat dari tiga indikator yaitu ; (1) Kesesuaian antara program dengan pemanfaat atau pengguna, (2) Kesesuaian

antara program dengan organisasi pelaksana, (3) Kesesuaian, antara kelompok pemanfaat. Adapun pembahasan secara rinci hal tersebut sebagai berikut.

1. Kesesuaian antara program dengan kelompok pemanfaat

Menurut teori David Corten kesesuaian antara program dengan pemanfaatan merujuk pada sejauh mana suatu perangkat lunak memenuhi kebutuhan dan tujuan penggunaannya. Ini mencakup kinerja, fungsionalitas, dan kemampuan program untuk memenuhi harapan atau kebutuhan pengguna.

Berdasarkan teori yang digunakan sesuai dengan hasil temuan dilapangan Dimana di Desa Rante Mario terdapat kesesuaian antara program *smart village* dengan pengguna atau pemanfaat dalam mengembangkan program yang dijalankan, mempertimbangkan kepentingan bersama, dan menciptakan kenyamanan. Di Desa Rante Mario, kesesuaian ini dianggap sangat penting untuk mendorong perkembangan desa dan menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Mamuju, terutama di Kecamatan Tommo.

Keberadaan program dan partisipasi pengguna dalam kemajuan desa, terutama dalam infrastruktur digital, layanan kesehatan, dan pendidikan. Pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masyarakat setempat diakui sebagai kunci efektivitas program dalam meningkatkan standar hidup melalui teknologi.

Meskipun penerapan program *smart village* di desa Rante Mario belum terorganisir secara menyeluruh, namun berbagai kalangan Masyarakat dapat menggunakan dan merasakan manfaat dari program tersebut. Meskipun terdapat hambatan, tetapi tetap diakui bahwa program ini memiliki potensi yang dapat

dioptimalkan melalui partisipasi bakat lokal. Dan sangat membantu masyarakat desa terutama perempuan untuk membuat cemilan dalam kemasan walaupun hanya di pasarkan secara lokal dan di perkenalkan melalui media. Pentingnya layanan dan peningkatan sistem menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk mengatasi kendala yang masih ada.

Tujuan utama dari program smart village ini adalah untuk menyentuh seluruh lapisan Masyarakat dengan fokus pada mencegah ketertinggalan dalam sektor Pendidikan dan ekonomi. Evaluasi keberhasilan program di ukur melalui keterbukaan pemerintah desa terhadap *implementasi* dari berbagai pihak serta Tingkat kepuasan layanan Masyarakat. Respon positif juga dari masyarakat terhadap *smart village* terhadap akses informasi dan layanan publik menunjukkan dampak positif program ini terhadap kemajuan desa. Meskipun terdapat beberapa keprihatinan dan saran, tetapi respon positif itulah yang menandakan bahwa program ini mampu mendukung kemajuan Desa Rante Mario.

Meskipun masih terdapat beberapa tantangan dan kebutuhan perbaikan dalam penerapan program *smart village*, potensinya telah memberikan manfaat kepada masyarakat desa. Keberhasilan ini juga terlihat dari respon positif dan dukungan masyarakat, memberikan harapan bahwa dengan meningkatkan layanan dan beradaptasi dengan masukan dari berbagai pihak, desa Rante Mario dapat terus berkembang dan lebih maju melalui program *smart village*.

2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana

Menurut teori David Corten kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana mengacu pada sejauh mana perangkat lunak dapat diintegrasikan dengan beroperasi sesuai dengan lingkungan dan proses yang ada di dalam organisasi tersebut. Ini mencakup ketersediaan fitur yang sesuai, integrasi dengan sistem yang ada, dan kemampuan program untuk mendukung tugas dan kebutuhan khusus organisasi pelaksana.

Berdasarkan teori yang digunakan sudah sejalan dengan hasil temuan dilapangan dimana Di desa Rante Mario terdapat evaluasi kesiapan sumber daya organisasi, terutama dalam ranah komunikasi digital, mencerminkan dedikasi yang signifikan melalui dukungan dari kepala Desa dan Sekdes. Namun keseksusan ini tercermin dalam penyediaan infrastruktur teknologi oleh beberapa organisasi, yang dapat meningkatkan efisiensi program. Meskipun demikian, tantangan terkait sumber daya dan keahlian teknis masih merupakan rintangan yang perlu diatasi. Meskipun diakui bahwa kebijakan dan program Desa pintar sejalan, penting diingat bahwa penyesuaian mungkin diperlukan seiring dengan perkembangan teknologi. Peran struktur pemerintahan dari Tingkat terendah hingga Tingkat nasional memiliki peran dalam perencanaan dan peningkatan kualitas didalam ranah digital organisasi. Pelatihan keterampilan dan promosi produk lokal melalui platfrom daring telah diimplementasikan. Respon positif dari Masyarakat menunjukkan bahwa program desa pintar memberikan dampak positif terhadap implementasi bisnis dan perkembangan ekonomi desa secara berkelanjutan Secara keseluruhan

menegaskan bahwa keselarasan, kesiapan sumber daya, dukungan kebijakan, dan usaha meningkatkan ekonomi lokal merupakan faktor-faktor kunci dalam kesuksesan pelaksanaan program desa pintar di desa Rante Mario. Dan adapun program *smart village* yang akan di kembangkan kedepannya adalah :

- 1) Orientasi ruang komunikasi digital desa.
- 2) Sosialisasi literasi digital.
- 3) Pelatihan digital marketing
- 4) Pelatihan jurnalistik
- 5) Pelatihan konten kreator

3. Kesesuaian antara kelompok dengan pemanfaat

Menurut David Corten kesesuaian antara kelompok pemanfaat merujuk pada sejauh mana program atau produk dapat memenuhi kebutuhan dan harapan dari berbagai kelompok pengguna atau pemangku kepentingan yang terlibat. Ini mencakup pemahaman dan pemenuhan fitur, fungsionalitas, dan antar muka pengguna yang relevan untuk setiap kelompok, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan teori yang digunakan sudah sejalan dengan temuan dilapangan dimana program di Desa Rante Mario bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan Pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi. Kelompok kader *smart village* di Desa Rante Mario memiliki tujuan yang jelas, seperti peningkatan literasi teknologi, pelatihan keterampilan, implementasi Solusi teknologi, dan pengembangan usaha lokal. Dan di lakukan juga evaluasi target Desa Cerdas yang bersifat fluktuatif tanpa penetapan target.

Kelompok kader masih dalam tahap perkembangan. Dengan upaya menciptakan ruang yang mendukung pertumbuhan minat dan bakat di bidang digital. Meskipun masih dalam proses pengembangan penting adanya sinergi dengan berbagai pihak yang dianggap penting untuk mengatasi kekurangan yang ada.

Pemenuhan kader ini dinilai relative memadai, dengan pemahaman teknologi yang perlu di tingkatkan. Pelatihan yang ada diberikan oleh pemerintah desa dianggap sebagai Langkah positif. Dan di perlukan pelatihan teknologi, pemanfaatan sumber daya lokal, dan menjalankan organisasi kader digital. Meskipun kondisi saat ini di anggap baik, namun masih ada hambatan, seperti minimnya pemahaman teknologi tentang regulasi serta ke amanan data. Dan pentingnya mengajari masyarakat untuk lebih memahami teknologi, efektivitas pengelolaan sumber daya, dan pelatihan pemerintah. Kesuksesan program *smart village* membutuhkan kolaborasi antara kelompok kader, pemerintah desa, dan masyarakat untuk mencapai tujuan Pembangunan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam *Implementasi smart village* memenuhi kebutuhan dan tujuan masyarakat lokal secara inklusif dan berkelanjutan. Dan berdasarkan indikator *implementasi* menurut David Corten.

1. Kesesuaian antara program dengan pemanfaatan atau pengguna

Pentingnya Kesesuaian antara program dengan pemanfaatan atau pengguna layanan dan peningkatan sistem menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk mengatasi kendala yang masih ada. Tujuan utama dari program smart village ini adalah untuk menyentuh seluruh lapisan Masyarakat dengan fokus pada mencegah ketertinggalan dalam sektor Pendidikan dan ekonomi. Evaluasi keberhasilan program diukur melalui keterbukaan pemerintah desa terhadap *implementasi* dari berbagai pihak serta Tingkat kepuasan layanan Masyarakat. Respon positif juga dari masyarakat terhadap *smart village* terhadap akses informasi dan layanan publik menunjukkan dampak positif program ini terhadap kemajuan desa. Meskipun terdapat beberapa keprihatinan dan saran, tetapi respon positif itulah yang menandakan bahwa program ini mampu mendukung kemajuan Desa Rante Mario.

2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana

Namun kesesuaian ini tercermin dalam penyediaan infrastruktur teknologi oleh beberapa organisasi, yang dapat meningkatkan efisiensi

program. Meskipun demikian, tantangan terkait sumber daya dan keahlian teknis masih merupakan rintangan yang perlu diatasi. Meskipun diakui bahwa kebijakan dan program Desa pintar sejalan, penting diingat bahwa penyesuaian mungkin diperlukan seiring dengan perkembangan teknologi.

3. kesesuaian antara kelompok dengan pemanfaat

Pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi. Kelompok kader *smart village* memiliki tujuan yang jelas, seperti peningkatan literasi teknologi, pelatihan keterampilan, implementasi Solusi teknologi, dan pengembangan usaha lokal. Dan di lakukan juga evaluasi target Desa Cerdas yang bersifat fluktuatif tanpa penetapan target.

B. Saran

1. Melakukan program edukasi dan pelatihan bagi warga desa untuk meningkatkan literasi teknologi. Hal ini dapat mencakup penggunaan perangkat mobile, akses internet, dan pelatihan dalam penggunaan aplikasi *e-government*.
2. Lebih mengembangkan platform partisipatif yang memungkinkan warga desa berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Aplikasi atau situs web khusus dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, dan mengajukan usulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, p. R. (2018). Inovasi Dalam Pelayanan Publik Di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi. *Politico*, 18(2), 265–275. <https://doi.org/10.32528/politico.v18i2.1659>
- Amari, r. O. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Smart Village Di Desa Ranupani Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Skripsi*.
- Ariadi, a. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja journal*, 2(2), 135–147.
- Aristoni, a. (2020). Implementasi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Model Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Jepara Perspektif Islam Terapan. *Yudisia: jurnal pemikiran hukum dan hukum islam*, 11(1), 67. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.7538>
- Awaludin, I. (2019). Strategi Penguatan Kompetensi Sdm Teknologi Informasi&Komunikasi (tik) Dalam Mengoptimalkan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (spbe). *Paradigma polistaat jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*, 2(2), 118–134. <https://doi.org/10.23969/Paradigmapolistaat.v2i2.2115>
- Aziz, n. A., & putri, n. P. (2021). Smart kampung, mereduksi birokratisasi pelayanan publik (studi pada desa wringinrejo, kecamatan gambiran, kabupaten banyuwangi). *Jurnal ilmiah administrasi publik*, 007(03), 414–422. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.03.12>
- Fais, a., & maradian, j. (2022). Analisis Fungsi Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Karang Anyar Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 71–75. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.158>
- Hidayat, w., ranius, a. Y., ependi, u., universitas, d., darma, b., universitas, m., & darma, b. (2014). *Penerapan Metode Usability Testing Pada Evaluasi Situs*.
- Hukum, j. C. (2017). *Implementasi Tata Tertib Sekolah Dalam Meningkatkan Karakter Kedisiplinan Siswa*. 2, 9–19.
- Imania, a. N., & Haryani, t. N. (2021). E – Government Di Kota Surakarta Dilihat Dari Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Wacana Publik*, 1(1), 176. <https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.53143>
- Islamic, J., & Manajemen, e. (2018). *No title*. 3(1), 89–98.
- Kasus, s., Kantor, d. I., Jatinom, D., & Blitar, k. (n.d.). *Menyelenggarakan Pelayanan Publik Pemerintahan Desa*. 48–57.

- Maharani, e. N., & kencono, d. S. (2021). Penerapan Smart Governance Dalam Smart Village Di Kalurahan Dlingo, Kabupaten Bantul. *Jisip Unja (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 5(2), 25–38. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v5i2.14472>
- Mahlopi. (2022). Supervisi Pendidikan Era Teknologi 5.0. *Adiba: Journal of Education*, 2(1), 133–141.
- Maulita, n. (2022). Abdi dosen. *Jurnal pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 352–356.
- Najahningrum, a. F. (2013). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 259–267.
- No title. (2018). 4(2), 154–162.
- Nurlukman, a. D., Chumaedy, a., Suryatman, a. G., & Tangerang, u. M. (2023). *Inovasi Pelayanan Publik Elektronik Sistem Aplikasi Bantuan Kota (sabakota) Kota Tangerang Latifah, cs: Inovasi Pelayanan Publik Elektronik Sistem Aplikasi Universitas Bina Taruna Gorontalo Pengguna Internet Di Indonesia Latifah, cs: Inovasi pela. 10*, 167–180.
- Rafinzar, r., & kismartini, k. (2020). Inovasi *e-Government* Dalam pelayanan Publik (studi Pada Faktor Pendukung Dan Penghambat Program E-Musrenbang Di Kota Surabaya). *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 227–250.
- Rastillah, r. (2020). Pengaruh Stratifikasi Sosial Terhadap Pelayanan Publik Di Kantor Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang. *Praja: jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(2), 101–111. <https://doi.org/10.55678/prj.v8i2.242>
- Rifqo, m. H., & wijaya, a. (2017). Implementasi Algoritma Naive Bayes Dalam Penentuan Pemberian Kredit. *Pseudocode*, 4(2), 120–128. <https://doi.org/10.33369/pseudocode.4.2.120-128>
- Rosad, a. M. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Managemen Sekolah. *Tarbawi: jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(02), 173. <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>
- Rupa, j. S., Octariza, s., Mutmainah, s., Rupa, s., Surabaya, u. N., Rupa, s., & Surabaya, u. N. (2021). *Teknik Pounding Pada Anak Sanggar*. 9(2), 308–317.
- Studi, p., & Administrasi, i. (2020). *Dosen universitas Muhammadiyah Sumatera utara (umsu) Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (umsu) 602. 14*, 602–614.
- Suprpto, s., & Malik, a. A. (2019). Implementasi Kebijakan Diskresi pada Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (bpjs). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v7i1.62>

- Supriyanto, e. E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (it) Melalui Program Elektronik Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan politik daerah*, 1(1), 141. <https://doi.org/10.24905/jip.v1i1.438>
- Suryana, s., Agustino, l., & Arenawati, a. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Dinas penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang. *Jdkp jurnal desentralisasi dan kebijakan publik*, 2(2), 239–251. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3415>
- Tasyah, a., leStari, p. A., Syofira, a., Rahmayani, c. A., Cahyani, r. D., & Tresiana, n. (2021). Inovasi pelayanan Publik Berbasis Digital (*e-government*) di Era Pandemi Covid-19. In *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* (vol. 18, Issue 2, pp. 212–224). Stia Lan Bandung. <https://doi.org/10.31113/jia.v18i2.808>
- Utama Andri Arjita. (2017). *E-government* Sebagai Bagian Dalam Smart City. *Seminar nasional Iptek Terapan (senit) 2017*, 15–17.
- Virgoreta, d. A., Pratiwi, r. N., puBlik, j. A., Administrasi, f. I., & Brawijaya, u. (n.d.). *Implementasi program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu , Kabupaten Tuban)*. 2, 1–5.
- Wahyudi, a. A., Firdausy, b. M., & Sari, n. R. (2022). Aplikasi *e-Government* dalam Inovasi Pelayanan Publik: studi Kasus Di Yogyakarta. *Jakpp (jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 8(1), 27–43. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v8i1.11527>
- Yuni, i. S., & Adnan, m. F. (2022). Efektivitas Penerapan Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile Dalam Upaya Mendukung Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-Government*). *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1), 1982–1994. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2648>

L

A

M

P

I

R

A

N





**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email : fsiip@unismuh.ac.id
Official Web : https://fisiip.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

Nomor : 2398/FSP/A.5-VI/IX/1445/2023

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Nur Mutma Inna
Stambuk : 105641108620
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi :


"Inovasi E-Government Dalam Pengembangan Tata Kelola Smart Village (Studi Kasus di Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju)"

Pembimbing I : Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
Pembimbing II : Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar,
Pada tanggal : 11 September 2023

D e k a n,


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727

Tembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Science



**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email: fisip@unismuh.ac.id
Official Web: <https://fisip.unismuh.ac.id>

Nomor : 0079/FSP/A.6-VIII/I/1445H/2024 M
Lamp. : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Peneliti dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Nur Mutma Inna
Stambuk : 105641108620
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Desa Rante Mario Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju.
Judul Skripsi : *"Inovasi E-Government dalam Pengembangan Tata Kelola Smart Village (Studi Kasus di Desa Rante Mario Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju)"*

Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.
Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 17 Januari 2024

Ketua Jurusan

Ahmad Harakan, S.IP., M.Hi
NBM : 1207 163



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Science



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Mamuju 91512, Telp/Fax : 0426-2325152, email : ptspsulawesibarat@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 00044/76.RP.PTSP.B/IJ/2024

1. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 31).
2. Menimbang : Surat Dari Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 3374/05/C.4-VIII/I/1445/2024 Tanggal 17 Januari 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA:

- a. Nama/Objek : **NUR MUTMA INNA**
b. NIM : 105641108620
c. Alamat : Bonto Ala Kec.Tommo
d. No.HP : 085348667336
e. Untuk : 1). Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data
"INOVASI E-GOVERMENT DALAM PENGEMBANGAN TATA KELOLA SMART VILLAGE (STUDI KASUS DI DESA RANTE MARIO KECAMATAN TOMMO KABUPATEN MAMUJU)"
- 2). Lokasi Penelitian : Di Desa Rante Mario
Kec.Tommo
- 3). Waktu/Lama Penelitian: **23 Januari s/d 23 Maret 2024**

Schubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan :

Biaya Rp. 0

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
2. Penelitian tidak Menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 25 Januari 2024

a.n. GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI BARAT,
Selaku Administrator Pelayanan Terpadu
Satu Pintu



H. HABIBI AZIS, S. STP. MM
Pangkat : Pembina Tk I
NIP : 19781216 199912 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Mamuju di Mamuju;
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mamuju di Mamuju;
5. Kepala Desa Rante Mario di Rante Mario;
6. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;
7. Peninggal;

Biaya Rp. 0



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nur Mutma Inna

Nim : 105641108620

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	4 %	10 %
2	Bab 2	4 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 4 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Wahidin, S.Hum., M.I.P.
NPM. 964 591

Nur Mutma Inna 105641108620 Bab I

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	godliemalatuny.blogspot.com Internet Source	1%
2	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
3	nipsurabaya.wordpress.com Internet Source	1%
4	123dok.com Internet Source	<1%
5	core.ac.uk Internet Source	<1%
6	forester12.blogspot.com Internet Source	<1%
7	id.scribd.com Internet Source	<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Nur Mutma Inna 105641108620 Bab II

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pmatondang.wordpress.com Internet Source	1%
2	Putri Agustina, Nurbaiti Nurbaiti. "Manajemen Pelayanan Publik Pada Pengelolaan Data Di Unit Layanan Dinas Disdukcapil Kota Medan", Jurnal Minfo Polgan, 2023 Publication	1%
3	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%
4	Eko Eddy Supriyanto. "Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia", Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 2016 Publication	<1%
5	Admin Admin. "TRANSFORMASI PARADIGMA DAN PROSES DALAM KONTEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK", Reformasi Hukum, 2020	<1%

Nur Mutma Inna 105641108620 Bab III

ORIGINALITY REPORT

7%
SIMILARITY INDEX

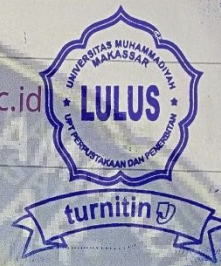
7%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** docplayer.info
Internet Source **5%**
- 2** e-campus.iainbukittinggi.ac.id
Internet Source **2%**



Exclude quotes Off Exclude matches < 2%
Exclude bibliography Off



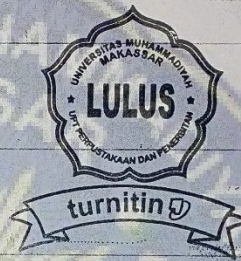
Nur Mutma Inna 105641108620 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

7%	7%	5%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ojs.unik-kediri.ac.id Internet Source	1%
2	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1%
3	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
4	www.agusdiar.com Internet Source	1%
5	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
6	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1%
7	core.ac.uk Internet Source	<1%
8	123dok.com Internet Source	<1%
9	id.123dok.com Internet Source	<1%



Nur Mutma Inna 105641108620 Bab V

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches







Wawancara dengan bapak I Komang Wisnu Wardana S.Sos
selaku kepala Desa Rante Mario



Wawancara dengan bapak I Komang Wisnu Wardana S.Sos
selaku kepala Desa Rante Mario



Wawancara dengan bapak Made Sandya selaku
Sekertaris Desa Rante Mario





Wawancara dengan ibu Rosmah selaku
Masyarakat Desa Rante Mario





Wawancara dengan ibu Kartini selaku
Masyarakat desa Rante Mario





Wawancara dengan bapak Muchtar
Selaku Masyarakat desa Rante Mario



RIWAYAT HIDUP



Nur Mutma Inna, lahir di Mamuju 18 November 2001, anak terakhir dari pasangan Hardi dan Normawati. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan tahun 2006 di sekolah taman kanak-kanak Nusa Indah dan tamat pada tahun 2007, dan pada tahun yang bersamaan tahun 2007 penulis melanjutkan Pendidikan di sekolah dasar SD Inpres Tommo V pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2014. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 2 Tommo dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Tommo dan tamat pada tahun 2020, pada tahun yang sama penulis mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan strata satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan dapat Menyusun Skripsi ini dengan judul implementasi e-government dalam pengembangan tata kelola *smart village* studi kasus di Desa Rante Mario Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju.